LAPORAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023

KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)

2023

BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
KATA PENGANTAR 2
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1. Latar Belakang 3
1.2. DASAR HUKUM 5
1.3. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN 8
1.4. URAIAN KEGIATAN 8
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 9
2.1 Dasar dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan 9
2.2 Pelaksanaan Kegiatan 11
1. Focus Group Discussion *(FGD)* 11
BAB III PENUTUP 13
LAMPIRAN 14

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya, penyusunan buku Laporan Tahunan Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) Tahun 2023 dapat diselesaikan penyusunannya.

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Perencanaan adalah juga cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama yang berorientasi pada masa mendatang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan–keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, maka dilaksanakan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD). Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menginventaris permasalahan, isu strategis serta mengumpulkan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang sumber daya alam antar perangkat daerah serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku laporan sub kegiatan ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 31 Desember 2023
Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam,

Ir. Benny Sakti, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19670927 199403 1 008

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan pada dasarnya berupa penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki. Selain itu, perencanaan merupakan pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu.

Agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sebaik-baiknya, suatu perencanaan sebaiknya juga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur tujuan, yaitu perumusan yang lebih jelas dan lebih terperinci mengenai tujuan yang telah diterapkan untuk mencapai.
b. Unsur *policy* (kebijaksanaan), yaitu metode atau cara untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.
c. Unsur prosedur, meliputi pembagian tugas serta hubungannya secara terperinci.
d. Unsur *progress* (kemajuan).
e. Unsur program.

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Perencanaan merupakan salah satu dari aspek manajemen disamping pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan,

perbaikan, dan perubahan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1 (satu) tahun. Dokumen perencanaan pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah memuat kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode 20 (dua puluh), 5 (lima) dan 1 (satu) tahun. Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat Pusat dan Daerah.

Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat terpilih tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”. Misi yang dituangkan dalam RPJMD 2021-2026 yang terkait dengan bidang ekonomi dan sumber daya alam adalah meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital serta meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan. Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut diperlukan penyusunan dokumen perencanaan yang matang dan akurat dengan memperhatikan tahapan dan mekanisme perencanaan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di sektor ekonomi dan sumber daya alam maka dilaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD). Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menginventaris permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan. Di samping itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang SDA antar perangkat daerah serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

1.2. DASAR HUKUM

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I9 Nomor 187);

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023;

8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;

9 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

10 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;

11 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207

tanggal 30 Desember 2022);

12 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;

13 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022);

14 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;

15 Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-41-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Nomor. 903-597-2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatangan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

16 Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 020/12/II/SET/Bappeda-2023 tanggal 8 Februari 2023, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

17 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2023, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor DPA-SKPD : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023, kegiatan 5.01.03.1.02.

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Sub kegiatan 5.01.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

1.3. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

Tujuan dari sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) adalah :

1. Melaksanakan mekanisme arah kebijakan perencanaan bidang SDA sesuai regulasi yang berlaku
2. Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan bidang SDA.
3. Melakukan koordinasi di bidang SDA dengan pusat, regional dan internasional.

1.4. URAIAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, telah dialokasikan dana melalui APBD awal Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 81.565.350,- dan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 15.211.600,-yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rapat-Rapat Koordinasi terkait penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
2. Melakukan pengumpulan data/informasi penunjang perencanaan pembangunan lingkup bidang SDA
3. Melaksanakan koordinasi terkait lingkup Bidang SDA dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan lingkup bidang SDA
5. Pengadaan alat tulis
6. Penggandaan laporan pelaksanaan kegiatan.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Dasar dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Perencanaan Pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 4, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah dengan prinsip-prinsip meliputi :

1. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
4. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Rencana Pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Perencanaan Pembangunan daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan :

1. Teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
2. Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

3. Politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan Pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan :

1. Holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
3. Spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Rencana Pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Bappeda Menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Dalam rangka mendukung proses perencanaan di sektor ekonomi dan sumber daya alam maka dilaksanakanlah kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD). Ruang lingkup kegiatan meliputi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada sub kegiatan ini dijabarkan sebagai berikut.

2.2 Pelaksanaan Kegiatan

1. Focus Group Discussion *(FGD)*

Dalam rangka proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 maka dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan di setiap sektor SDA. Rapat ini bertujuan untuk menjabarkat terkait permasalahan dan isu strategis secara detail dari masing-masing perangkat daerah lingkup SDA.

Rapat dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/45/III/Eko-SDA/Bappeda-2023 Tanggal 8 Maret 2023 dan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2023. FGD dilakukan dengan pemaparan materi dari Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Hasil rapat :

- Rapat ini adalah salah satu rangkaian dalam menyusun dokumen perencanaan yaitu untuk menjaring apa saja yang menjadi isu strategis yang pada OPD di lingkup Sumber Daya Alam (SDA) yang nantinya akan dituangkan dalam dokumen perencanaan.
- Perlu didiskusikan apa saja kegiatan kegiatan yang perlu disinergikan di OPD lingkup SDA
- Kegiatan ini akan dijadikan penajaman program tahun 2024
- Pemaparan oleh masing-masing dinas (terlampir).

Foto kegiatan :

BAB III

PENUTUP

Pelaksanakan sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) sangatlah penting dalam rangka mendukung proses perencanaan pembangunan di lingkup bidang sumber daya alam. Melalui sub kegiatan ini diharapkan dapat menginventaris permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan bidang sumber daya alam. Disamping itu juga diperoleh informasi, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam antar OPD serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Pelaksanaan sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) pada tahun 2023 tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan rencana pelaksanaan sub kegiatan yang telah disusun karena adanya keterbatasan waktu dan sumber daya yang tersedia, namun secara substansi dan tujuan pelaksanaan sub kegiatan dapat dicapai sesuai dengan anggaran yang tersedia.

LAMPIRAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 7054555-7055627-7054374
E-mail: bappeda@sumbarprov.go.id *Homepage*: http://bappeda.sumbarprov.go.id

Padang, 9 Maret 2023

Nomor : 050/45/III/Eko-SDA/Bappeda-2023
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan

Kepada Yth. :
Daftar Terlampir
di
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 maka diundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada ;

Hari/Tanggal	: Jumat / 10 Maret 2023
Pukul	: 08.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Lt. III Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Agenda	: *Focus Group Discussion* (FGD) Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan di Setiap Sektor SDA

Sehubungan dengan perlunya penjabaran terkait permasalahan dan isu strategis secara detail dari masing-masing Perangkat Daerah diharapkan kehadiran dari pejabat esselon III masing-masing bidang serta JF program.

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala,

Medi Iswandi, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

Lampiran 1
Surat Nomor : 050/45/III/EKO-SDA/Bappeda–2023
Tanggal : 8 Maret 2023

Kepada Yth. :

No	Peserta Rapat	Jumlah
1	Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	6 orang
2	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat	6 orang
3	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	6 orang
4	Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat	6 orang
5	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	6 orang
6	Kepala Bidang Ekonomi-SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	1 orang
7	JFP Bidang Ekonomi-SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	5 orang
8	Pelaksana Bidang Ekonomi-SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	12 orang
Total		48 orang

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : Jum'at/ 10 Maret 2023 / Jam → 13.30 sampai 14.30 Siang

TEMPAT : Ruang Rapat Lt. III Bappeda

ACARA : Focus Group Discussion (FGD) Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan di Setiap Sektor SDA

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP	TANDA TANGAN
1	Benny Yamshal Efendi	Dinas Pangan	085274037046	1 [signature]
2		-"-		2 [signature]
3	Yanita Selly M.	-"-	081275665515	3 [signature]
4	Deviyanti	Bappeda Prov	081374054959	4 [signature]
5	Maswal Noor	Dishut		5 [signature]
6	Bambang S	"	082170230011	6 [signature]
7	Ngo Sandy	"	081373745252	7 [signature]
8	Sayogo H	-"-	085375067828	8 [signature]
9	Rosalinda	Bappeda	081275878988	9 [signature]
10	Darmayanti	DPKH Prov Sumbar	081363213705	10 [signature]
11	Emmi Nurni	DKP Prov SB	085263575111	11 [signature]
12	Suli Harder	DKP SB	081212208115	12 [signature]
13	Murni Kurniaty	Dinas Pangan		13 [signature]
14	Rafni Okvita	Dinas PTPH	082288065464	14 [signature]
15	DEVI IRMAYENI	D. PANGAN	081277786135	15 [signature]
16	Efoze Karni	DPKH SB	08126604911	16 [signature]
17	M. Kamil	DPKH SB	081363224177	17 [signature]
18	ADIRA MULIAWAN	D. PANGAN	081363490749	18 [signature]
19	Yossy Novita	DKP	08126159898	19 [signature]
20	Firma Hamidi	DKP	081266351977	20 [signature]
21	AZMI BUT	DINAS PANGAN	081363435348	21 [signature]
22	Hamra Zamdan	DPTPH	081363448492	22 [signature]
23	Ryka Merdekawati	DPKH	081363363335	23 [signature]
24	Jusmelina	Dishut		24 [signature]

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP	TANDA TANGAN
26	Sukardi	DPKPA	081277880205	26
27	Yoel Kaf	Disbuntanhor	082387107348	27
28	YANIWEL HENDRI	DKP	0822 8838 8180	28
29	Yozarwardi	Dishut		29
30	Kurnowo	Dishut		30
31	Hany Febri	JFP Eko SDA		31
32	Zulfelmar	staf Eko SDA		32
33	Dela Resina	Bappeda		33
34	zulfina	Dinas PTPH	085263031704	34
35	Ramli	- . .		35
36	Ferdinal Asmin	Disbuntanhor	081290350920	36
37	Dora Zahra	Dinas PTPH	085264834664	37
38	Dasrizal	Eko - SDA		38
39	AFRIZON	-		39
40	Refi	DKP		40
41	Nizhamul B	"		41
42	Linda Firani	EKO - SDA		42
43	A.Y. Rinaldi	PPTPH	081363261232	43
44	Khairil Agustiawan	"	0823-2501-0476	44
45	Yulia Madhani	DLH		45
46	Hasnil			46
47	Wonyanti			47
48	REFI WAFDA			48
49	Marwan	DKP		49
50				50
51				51
52				52
53				53
54				54

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 0751.7056335 Fax.0751.7055676

NOTULEN RAPAT

Kepada : Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dari : Kepala Bidang EKO SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Tanggal : 10 Maret 2023
Perihal : Rapat Evaluasi Aplikasi Dashboard Pembangunan

Waktu dan Tempat Pelaksanaan	:	Jumat 10 Maret 2023 Ruang Rapat Lt. III Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dasar	:	Undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat nomor : 050/45/III/EKO/Bappeda-2023 tanggal 8 Maret 2023
Pimpinan Rapat	:	Kepala Bidang EKO dan SDA/Fungsional Perencana Ahli Madya/Muda
Peserta Rapat	:	- Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat - Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat - Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat - Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat - Staf Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Agenda Rapat	:	• Fokus Group Discussion (FGD) Permasalahan dan Isu strategis Pembangunan di setiap Sektor SDA
Pembahasan	:	Bappeda • Rapat ini adalah salah satu rangkaian dalam menyusun dokumen perencanaan yaitu untuk mejaring apa saja yang menjadi isu strategis yang pada OPD dilingkup Sumber Daya Alam (SDA) yang nantikanya akan dituangkan dalam dkumen Perencanaan. • Perlu didiskusikan apa saja kegiatan kegiatan yang perlu disinerjikan di OPD lingkup SDA • Kegiatan ini akan dijadikan penajaman program tahun 2024 Kepala Dinas Pangan: • Ada beberapa parameter yang harus disesuaikan • Indek ketahanan Pangan berada posisi ke 8 • 10 Isu strategis - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah KWT Yang dibina Jumlah KWT yang dibina (rempah) Julah Kelompok Panganlokal yang dibina - Pengembangan Kelembagaan dan jaringan Distribusi Pa Jumlah pengadaan Cadangan PanganPemerintah Provinsi - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jumlah pengadaan cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, kita wajib menyediakan 100 ton beras untuk menjaga ketahanan pangan - Kordinasi dan singkronisasi penanganan kerawanan Pangan Provinsi

Mandiri Pangan, punya 120 nagari
- Penanganan Daerah rawan Pangan

Jumlah masyarakat yang terdampaak dan berisiko rawan pangan dan gizi serta stunting yang dibantu
- Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi

Jumlah kelembagaan keamanan pangan segar yang dibina

JUmlah sampael pengawasan Pangan segar yang beredar di masmyarakat yang diuji laboratorium
- Kodinasi dan singkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi dan Jumlah Roadmap Pangan local yang dilaksanakan
- Bazar/Pasar Murah TTIC
- Sertifikat Prima Pangan Segar Asal Tumbuhan
- Registrasi Keaanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
- Laboratorium Keamanan Pangan Segar

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Yang menjadi isu strategis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah :

- Peningkatan pendapatan petani, peternakan, hilirisasi dan pengembangan tata niaga yang berpihak kepada petani
- Peningkatan sarana dan prasarana penunjang produksi pertanian (peternakan), sarana produksi pemasaran dan permodalan serta kelembagaan petani (peternakan)
- Optimalisasi peningkatan produktifitas pertanian (peternakan)
- Optimiliasi nilai tambah dan daya saing produk pertanian (peternakan)
- Akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi untuk hilirisasi pertanian (peternakan)
- Optimilisasi ketersediaan, keterjangkauan distribusi, pengawasan dan keamanan pangan
- Kurang optimalnya pelestarian dan pengembangan sumberdaya genetik ternak lokal
- Kurang optimalnya usaha pembibitan dan penyediaan bibit ternak lokal yang berkualitas, dengan prinsip "Good Breeding Practices" dan "Good Farming Practices" secara berkelanjutan
- Ketersediaan pakan ternak berkualitas kurang
- Kompetensi SDM dan kelembagaan peternak
- Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
- Kurangnya penyediaan pelayanan publik yang mendukung fungsi pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan

Ada 6 program daerah Pernkan dan Kesehatan Hewan yakni;

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
- Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
- Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- Program perizinan usaha pertanian
- Program penyuluhan pertanian

Ada 2 Program Pusat

1. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Bappeda

- Masalah Produksi untuk 2024 bagaimanan dengan SAPI?
- Penaganan Penyakit PMK
- Mohon adminsimbanda lebih proaktif lagi
- Definisi pelatihan untuk sertifikat Pelathan

Jawab.
Dinas Peternakan:
Sudah ada Permentan Nomor 17 tahun
Sudah boleh dilalulintaskan ternak diseluruh provinsi di Indonesia, dengan persyaratan persyaratan yang telah ditentukan
Pemasukan ternakan di sumatera Barat ada 3 syarat yang telah ditetapkan :

1. Sudah Vaksin Hewan
2. Daerah tertular atau daerah wabah harus negative labratorium
3. Surat Keterangan kesehatan Hewan dari daerah asal Hewan

Dinas Kehutanan

- Jumlah Hutan Konserfasi sebanyak 365 Nagari
- Jumlah Hutan Lindung sebanyak 305 Nagari
- Jumlah Hutan Produksi sebanyak 280 Nagari

Ada tiga (3) yang menjadi isu srrategis dalam meningkatkan kualitas HUtan dan Lahan

- Meningkatkan resiliensi ekosistem hutan terhadap perubahan iklim melalui upaya mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi jumlah hotspot dan luas areal yang terbakar, koordinasi dan pelaporan hasil inventarisasi dan pemantauan efek gas rumah kaca, penanganan isu-isu terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta percepatan penanganan pengaduan perkara lingkungan hidup dan kehutanan
- Meningkatkan pengamanan hutan dan penanganan illegal logging melalui pemantapan koordinasi, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, patroli dan operasi serta penegakan hukum, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan, serta peningkatan peran serta masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari dan Masyarakat Peduli Api
- Melanjutkan program rehabilitasi hutan dan lahan (sipil teknis dan vegetatif), diarahkan kepada peningkatan ketahanan daya dukung air dan tanah, utamanya pengelolaan dan operasionalisasi KPH serta pengelolaan hutan rakyat.
- Memperkuat data dan informasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Budidaya Perkebunan terutama Kelapa Sawit

Bappeda

- Apresiasi karna Peningkatan pendapat Petani sudah mencapai 6,11 persen
- Utk tahun 2024 verifikasi renja sudah detail sampai pada rincian
- Untuk peningkatan SDM perlu ditetapkan berapa standar harga standar biaya sehingga waktu verifikasinya dapat diketahui yang menjadi kebutuhan Dinas

Kepala Dinas Pertanian
Isu strategis

- Penguatan LP2B dan LSD

- Penguatan kawasan sentra pertanian
- Praktek pertanian ramah lingkungan berbasis sumber daya local
- Smart farming, digitalisasi mendukung kemandirian petani
- Tata kelola komoditi pertanian
- Penguatan kelembagaan petani dan pertanian
- Sekolah lapang pertanian (pra panen, budidaya dan pasca panen)
- Peningkatan pendapatan petani

Permasalahan pembangunan pertanian Sumbar

- Sumber daya lahan pertanian menghadapi trend penurunan kuantitas dan kualitas
- Sumber daya Manusia Petani Sumbar perlu mendapatkan perhatian, diantaranya pendidikan dan umur
- Luas kepemilikan lahan sawah dan non sawah masih kecil
- Kelangkaan dan mahalnya saprodi serta kualitas infrastruktur prasarana pertanian
- Hilirisasi produk pertanian belum link dan mact dengan industry pengelolaan
- Kelembagaan petani yang masih perlu diperkuat menuju kemandirian petani
- Teknologi pertanian efisiens dan efektif perlu didorong
- Kelembagaan pertanian inklusif perlu didorong

Bappeda:

- Untuk 2024 apresiasi karna sudah terbentuk tim percepatan pendapatan petani pada dinas Pertanian.
- Penetapan Indikatornya dilakukan oleh BPS, namun angka sub sektor belum berkembang, agar diupayakan lebih tinggi nilainya
- Banyak kab kota protes bahwa RTRWnya tidak sesuai,
- Untuk luas tanam dari segi kualitas menurun
- Perda nomor 4 tahun 2020 ada amanah yang belum dibreakdown
- LP2Bnya tolong direview, dibentuk Tim pengendalian dan tata cara pemberian insentif yang diatur dengan peraturan Gubernur
- Mengenai pupuk Organik , pertanian organik tolong digalakan kembali
- Tentang OPH bagaimana keadaannya sekarang ini
- Bagaimana dengan kondisi embung karna kaitannya dengan kebutuhan irigasi tersiernya.
  Jawab : 60% irigasi tersier masih berfungi, kewenangan untuk primer dan sekunder itu berbagi.
- Untuk alsintan tahun 2024 tidak diakomodir lagi, karena dengan pemutakiran kegiatan yang ada sekarang adalah pengawasan bukan pengadaan.
- Pemberian pokok pikiran DPRD perlu menetapkan persyaratan yang tertulis agar tidak lagi ada pokir yang berubah berubah sehingga tidak semua usulan aka nasal asal masuk ke dinas pertanian, maksudnya untuk lebih terstandarisasi.

Kepala Dinas Kelauatan
Program Prioritas Nasional

- Pengembangan kawasan Konservasi
- Penagkapan terukur
- Budidaya Berbasis Ekspor
  Rencana akan dibuat Pengembangan budidaya ikan gariang, akan

dikembangan acerinya disicincin , lobster sama kepinting akan dikembangkan pada daerah konservasi dan daerah magro
- Hilirisasi Produk Perikanan
- Penaganan sampah laut

Potensi budidaya laut : 4,381,90, daerah potensi budidaya laut mentawai, pesisir selatan, Kota Padang dan Pasaman Barat.
Disamping ikan kering/asin dan ikan asap, melalui pembinaan yang dilakukan telah muncul jenis-jenis olahan baru yang mempunyai nilai tambah tinggi seperti :
- Rendang, abon, sate,nugget, dendeng ikan tuna, lele asap, abon lele, stick lele, dendeng tulang ikan, crispy ikan teri, maco, ladu, sala lauak, kerupuk sala, amplang
- Frozen ikan (bakso, nugget, sosis, otak-otak, tahu tuna, empek2 dll)

Pemanfaatan: 50 Ha
Budi Daya Laut :
- Budidaya lobster (akan dikembangkan)
- Budi Daya Kepiting (akan dikembangkan)
- Budidaya Kerapu (akan dikembangkan)
- Budidaya Rumput Laut (akan dikembangkan)

Isu strategis :
- Usaha di bidang perikanan baik perikanan tangkap, budidaya maupun pengolahan hasil perikanan masih didominasi usaha skala kecil dan menengah
- Kebutuhan benih ikan untuk usaha budidaya laut dan payau belum terpenuhi perlu pengembangan UPR yang bersertifikat
- Pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan belum optimal
- Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil
- perikanan
- Praktek penangkapan ikan yang merusak ekosisitem dan mengancam kelestarian sumberdaya ikan (destructive fishing dan IUU fishing)
  Kita Tidak punya kapal yang ukup untuk menertipkan penagkapan ikan
- Armada kapal Perikanan diatas 30 GT yang menangkap ikan di wilayah pantaibarat harusnya bisa mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan Bungus
- Banyak dipasang rumpon oleh nelayan diluar Sumatera Barat
- Terjadinya degradasi ekosistem laut dan pesisir serta perairan umum
- Pemanansan Global, Perubahan iklim , abrasi dll
- Pemanfaatan lahan usaha perikanan yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah.
- Ekspor hasil perikanan melalui provinsi lain
- Tingginya biaya produksi perikanan budidaya karena harga pakan yang selalu meningkat
- Belum tercukupinya kebutuhan BBM untuk Kapal Perikanan di Provinsi Sumatera Barat, dimana kebutuhan solar mencapai 39 juta liter/tahun sedangkan pertalite 51.7 juta liter/tahun.
- Kesehatan laut à Banyaknya sampah di laut

Bappeda
- Target pada indikator RPJMD baiknya bekerja sama dengan BPS untuk kajian
- Kawasan konserpatif baru bisa dikelola jika sudah ada SK Menterinya sedangkan kita baru membuat SK Gubernur, bagaimana selanjutnya

		Jawab : Untuk yang 6 daerah konservasi sudah ada SK Menterinya • Apa upaya upaya mengatasi kebocoran kebocoran budidaya laut Jawab : Untuk uPT sudah di sepakati kawasan-kawasanya • Mohon dipercepat pembuatan Peta Kawasan sebagai pengalokasian untuk sentra sentra sebagai bahan pembahasan nantinya. • Croscating kegiatan yg dikerjasamakan dengan OPD seperti Danau Maninjau • Pesisir dan mentawai agar berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata • Terkait Ekspor agar berkoordinasi dengan dinas Perindag • Kerjasama dengan PTSP bagainama dengan ekspor nya • Penertiban Kerambah ditepi pantai perlu dibuat regulasi agar tidak menjadi pencemaran nantinya.
Kesepakatan/ Tindak Lanjut	:	1. Apa yang dibahas pada FGD ini akan dibahan nanti pada pembahasan Renja 2. Standar harga standar biaya harus lengkap pada pembahasan Renja nantinya
Dokumentasi	:	
Penutup	:	Demikian disampaikan, terima kasih.

Notulis,

Rosalinda

Focus Group Discussion (FGD) Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan di Setiap Sektor SDA

Disampaikan oleh :

Ir. E F E N D I, MP
Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

Padang, 10 Maret 2023

Kaitan Visi - Misi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan

VISI	Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan
Misi Ke-3	Meningkatkan Nilai Tambah Dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
Tujuan	Meningkatkan kesejahteraan petani
Sasaran	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan

Dinas Pangan

Tujuan	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
Sasaran	1) Meningkatnya Ketersediaan Pangan 2) Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Pangan 3) Meningkatnya Keamanan Pangan 4) Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN PER MISI (3)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
					2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan										
Meningkatkan kesejahteraan petani **IK: Persentase Peningkatan Pendapatan Petani**	2. Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	Indeks ketahanan Pangan	Indeks	78,64	79,13	80,21	81,60	82,05	83,22	83,22

Rencana Strategis
Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun ke -					
								1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	1.1	Ketersediaan Pangan Pokok	ton	820.798	833.110	845.607	858.291	871.165	884.233
			2	Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Masyarakat	2.1	Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	82,00	82,50	83,00	84,00	84,50	85,00
			3	Meningkatnya Keamanan Pangan	3.1	Persentase Keamanan Pangan Segar Aman Dikonsumsi Masyarakat	%	82,00	83,00	83,5	84	84,5	85
			4	Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis	4.1	CV Harga Bahan Pangan Pokok dan Strategis							
						- Beras	CV	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
						- Cabe merah	CV	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25
						- Bawang Merah	CV	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Misi ke - 3	• Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan
Indikator Kinerja	• Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Indikator	2021		2022		2023
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	78,64	79,55	79,13	79,45	80,21

Realisasi Capaian Kinerja
Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA 2022	Realisasi	%
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	1.	Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan strategis (ton) *	833.110	885.080	106,24
2	Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Masyarakat	2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82,50	89,80	108,85
3	Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat	3.	Persentase pangan segar aman yang dikonsumsi masyarakat (%)	83,00	88,52	106,65
4	Stabilnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen	4.	Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Coefisien Variation / CV)			
			4.1. Beras (%)	≤ 10	5,67	100,00
			4.2. Cabe Merah (%)	≤ 25	24,68	100,00
			4.3. Bawang Merah (%)	≤ 25	23,83	100,00
5	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	5.	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	75	78,27	104,36
6	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	6.	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (%)	75	81,57	108,76

**) Angka Sementara 2022*

PROGRAM UNGGULAN

Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

KINERJA PROGRAM UNGGULAN

Provinsi Sumatera Barat

(Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor : 050 – 47 – 2022 Tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026)

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
SUMBAR SEJAHTERA								
I. **Meningkatkan pendapatan petani & nelayan serta mengalokasikan 10 % anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian**								
1. Pengalokasian anggaran untuk sektor pertanian sebesar 10% dari total APBD. 2. Distribusi anggaran untuk Dinas perkebunan Tanaman pangan dan holtikultura, dinas pangan, dinas kelautan dan perikanan, dinas Kehutanan, serta dinas SDA dan Bina kontruksi untuk irigasi 3. Pengalokasian anggaran termasuk gaji, DAK, dana hibah, dan dana transfer lainnya 4. Focus kegiatan pada: a. menyiapkan benih/bibit bermutu (pertanian, kelautan perikanan dan peternakan) b. meningkatkan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan c. optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung produksi	d. Urusan Pangan							
	- Jumlah benih/bibit bermutu yang disediakan (batang)	-	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000	**Dinas Pangan** Sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
	22. Jumlah Revitalisasi dan penyediaan RMU mobile (unit/PPK/RMU)	-	-	300	300	300	300	**Dinas Pangan** Sub kegiatan : Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
	26. Jumlah kelompok wanita yang diberdayakan dalam pemanfaatan pekarangan (kelompok)	112	112	112	112	112	112	**Dinas Pangan** Sub kegiatan :

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
pertanian, peternakan dan kelautan dan perikanan d. peningkatan upaya minimalisasi resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen atau produksi baik oleh hama penyakit dan bencana alam e. meningkatan efisiensi usaha pasca panen pengolahan hasil dan peningkatan mutu dan nilai tambah produksi pertanian, peternakan kelautan dan perikanan serta kehutanan f. diversifikasi pangan dan usaha produktif yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi g. lancarnya akses distribusi pangan dan aksesibilitasi produksi pangan	27. Jumlah kelompok wanita yang diberdayakan dalam pemanfaatan pekarangan (kelompok)	52	52	52	52	52	52	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	28. Jumlah TTIC yang beroperasional dengan baik (unit)	1	1	4	4	4	4	**Dinas Pangan** Sub kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
5. Penanggung jawab Progul Dinas Perkebunan, Tanaman dan Holtikultura								
IV. Mencetak 100 ribu *millennial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif								

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET					SKPD/SUB KEGIATAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Definisi operasional : 1. Memfasilitasi tumbuhnya 100 ribu milenial entrepreneur dan woman entrepreneur yang direncanakan akan dilaksanakan dalam 5 tahun dengan proporsi 20 ribu setiap tahunnya dari tahun 2022 sampai dengan 2026 2. 100 ribu milenial tersebut tersebar pada beberapa sector, baik pertanian, peternakan, perikanan, industry, UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif dan sector potensial lainnya 3. Untuk pencapaian target 100 ribu milenial tersebut perlu pembagian secara proporsional dengan kabupaten/kota 4. Definisi terkait dengan entrepreneur yakni : a. Telah menerima Pendidikan kewirausahaan dan atau b. Sudah memulai usaha 5. Bekerjasama dengan akselarator 6. Penanggung jawab progul Dinas Koperasi dan UKM	1. Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	5.846	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Target Provinsi
	n. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pangan (orang)	266	112	112	112	112	112	**Dinas Pangan** Sub kegiatan : Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Program Strategis Tahun 2023

Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2023

No.	Program Strategis	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2023
1	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Jumlah KWT yang dibina - Jumlah KWT yang dibina (rempah) - Jumlah Kelompok Pangan lokal yang dibina	119 KWT KRPL, 17 KWT Rempah dan 26 Kelompok Pangan Lokal
2	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah revitalisasi PPK	80 Unit
3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100 ton beras
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	1. Jumlah Nagari Mandiri Pangan yang dibina 2. Jumlah Pelaksanaan Penas Tani 2023	1. 120 Nagari 2. 1 kali
5	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah masyarakat yang terdampak dan beresiko rawan pangan dan gizi serta stunting yang dibantu	2.000 KK
6	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	- Jumlah kelembagaan keamanan pangan segar yang dibina - Jumlah sampel Pengawasan Pangan Segar yang beredar di masyarakat yang diuji laboratorium	- 19 Kab/kota - 361 sampel

No.	Program Strategis	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2023
7	Bazar/Pasar Murah TTIC	- Jumlah Distribusi bahan Pangan, Gelar Pangan Murah , Operasi Pasar dan bazar pasar murah yang dilaksanakan - Jumlah Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan yang dilaksanakan	- 10 komoditi pangan pokok strategis - 300 kali bazar
8	Sertifikat Prima Pangan Segar Asal Tumbuhan	- Jumlah Pangan Segar Yang Memiliki Sertifikat Mutu dan Keamanan	- 100 sertifikat
9	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	- Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Yang di Terbitkan Nomor Registernya - Jumlah Registrasi Rumah Kemas yang diterbitkan	- 50 nomor register PSAT - 3 nomor register rumah kemas
10	Laboratorium Keamanan Pangan Segar	Jumlah Laboratorium Keamanan Pangan Segar	1 Laboratorium

APBD Tahun 2023

Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

KEGIATAN APBD TAHUN 2023

APBD Tahun 2023 = Rp. 45.803.936.487,-

APBD Murni	**= Rp. 34. 637.111.487,-**
Hibah	**= Rp. 7.195.825.000**
Pokir	**= Rp. 3.971.000.000**

Total Usulan Pokir Tahun 2023 = 14 Usulan

Terdiri dari 4 Program, 14 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan

Rekap Usulan Pokok Pikiran Tahun 2023

Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

Rekap Pokir yang di Akomodir Dinas Pangan Tahun 2023

No	DPRD	Permasalahan	Taget/ Satuan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Anggaran
TOTAL POKIR DINAS PANGAN TAHUN 2023							**3.971.000.000**
1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							**740.000.000**
1	AFRIZAL	pemberdayaan kelompok wanita tani melalui KRPL	2 kelompok	padang, Kota Padang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	100.000.000
2	HARDINALIS KOBAL	Pemberdayaan kelompok wanita tani belum maksimal dalam hal pemanfaatan pekarangan		solok, Kab. Solok	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	150.000.000
3	JASMA JUNI	BANTUAN ITIK	3 kelompok	KAYU TANAM, Kab. Padang Pariaman	2 x 11 Kayu Tanam	Seluruh Kelurahan/Desa	150.000.000
4	MUZLI M. NUR	BANTUAN KWT DALAM PEMANFAATAN LAHAN UNTUK PERSEDIAAN SUMBER DAYA LOKAL		SEMUA KABUPATEN PASAMAN BARAT, Kab. Pasaman Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	150.000.000
5	MUZLI M. NUR	BANTUAN PEMBEDAYAAN DAN PEMANFAATAN PANGAN BERUPA BIBIT TANAMAN REMPAH DI KABUPATEN PASAMAN DAN KAB PASAMAN BARAT		KABUPATEN PASAMAN DAN KAB PASAMAN BARAT, Kab. Pasaman	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	100.000.000
6	YUNISRA SYAHIRAN	Pemberdayaan kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan pangan berupa bibit tanaman rempah	6 Kelompok	kabupaten Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	90.000.000

No	DPRD	Permasalahan	Taget/ Satuan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Anggaran
2. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							**3.031.000.000**
1	ARKADIUS	PENANGGULANGAN STUNTING	2.500 orang	KOTA PADANG DAN KAB. TANAH DATAR, Kab. Tanah Datar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	200.000.000
2	ARKADIUS	Bantuan Sembako di Kabupaten Tanah Datar	2.500 paket	KABUPATEN TANAH DATAR, Kab. Tanah Datar	Batipuh	Seluruh Kelurahan/Desa	250.000.000
3	BAKRI BAKAR	Penanggulangan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan	1 Paket	Penanggulangan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kab. Pesisir Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	400.000.000
4	LAZUARDI ERMAN	Bantuan Stunting		Agam, Kab. Agam	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	350.000.000
5	RAFDINAL	Bantuan Sembako		Bantuan Sembako di agam, Kab. Agam	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	250.000.000
6	AFRIZAL	Pengentasan rawan Pangan dan Stunting		Kota Padang			50.000.000
7	SUWIRPEN SUIB						1.531.000.000
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi							**200.000.000**
1	ARKADIUS	PENGEMBANGAN 2 KAWASAN NAGARI PANGAN	3	NAGARI PANGAN KAB. TANAH DATAR, Kab. Tanah Datar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	200.000.000

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi Sumatera Barat

Total Pengadaan CPP
(dari tahun 2010 – 2022)

876,6 Ton

Pada Tahun 2022, telah dilakukan pengadaan CPP sebanyak 141,8 ton

Total Penyaluran CPP
(dari tahun 2010 – 2023)

493,3 Ton

Pada Tahun 2023, telah disalurkan sebanyak 75,785 Ton ke Padang Pariaman

Stok CPP saat ini
(9 Maret 2023)

383,3 Ton

CPP seharusnya sesuai Perhitungan Permentan Nomor 11 Tahun 2018

547,384 TON
(- 164,084Ton)

Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA)

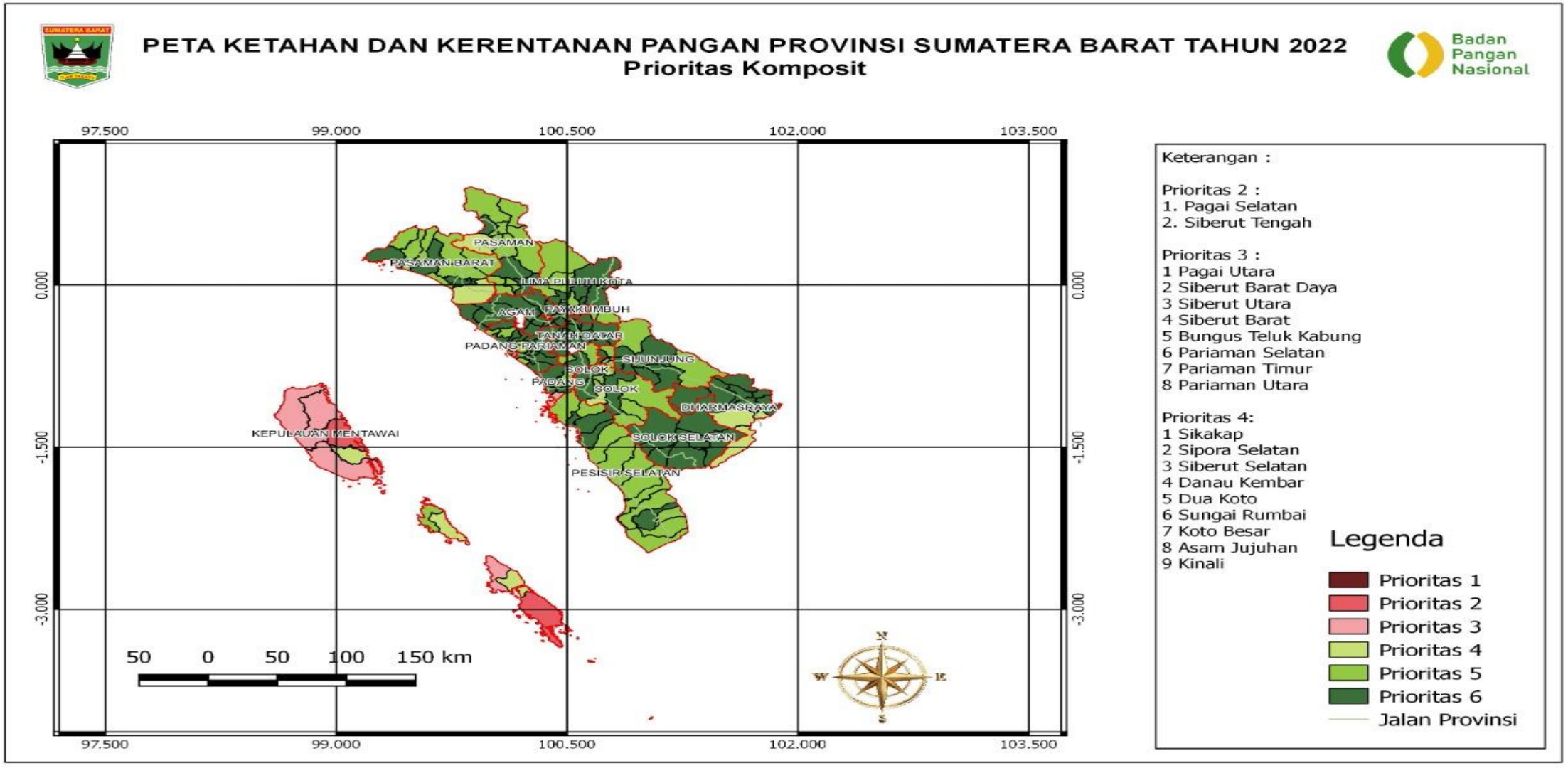

Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA)

1. Berdasarkan hasil analisa ketahanan dan kerentanan pangan dari peta komposit **tingkat provinsi (data tingkat kecamatan)**, dimana dalam pengelompokan komposit yang terbagi pada 6 prioritas (1-6) ketahanan dan kerentanan pangan wilayah, dari 148 kecamatan di Provinsi Sumatera Barat **2 kecamatan menempati prioritas 2 (1,35 %), 4 kecamatan pada Prioritas 3 (2,70 %), 9 kecamatan menempati prioritas 4 (6,08%) dan 133 kecamatan pada Prioritas 5 - 6 (91,9 %).**
2. Dari dua kecamatan yang terletak pada Prioritas 2 ini semuanya terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai (2 kecamatan) yaitu Kecamatan Siberut Tengah dan Kecamatan Pagai Selatan.
3. Sebanyak empat kecamatan terletak pada prioritas 3 dan ini juga tersebar di Kabupaten Kepulauan Mentawai (4 kecamatan) yaitu : Kecamatan Pagai Utara, Siberut Barat Daya, Siberut Utara dan Kecamatan Siberut Barat.
4. Penyebab utama dari penempatan prioritas dari analisa komposit di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah aspek ketersediaan air bersih, aspek jumlah tenaga kesehatan per rasio jumlah penduduk, aspek jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (jumlah lama perempuan bersekolah umur diatas 15 tahun). Hal tersebut kalau kita cermati lebih dalam banyak faktor pembatas penyebab kerentanan pangan tersebut yaitu seperti kondisi geografis yang sulit dijangkau dan lokasi yang jauh dari pusat kabupaten dan provinsi.

5. Berdasarkan analisa ketahanan dan kerentanan pangan dari **peta komposit tingkat kota**, yang juga pengelompokan komposit terbagi pada 6 prioritas (1-6), dimana dari 31 kecamatan Provinsi Sumatera Barat 4 kecamatan yang menempati prioritas 3 (12,90 persen) dan tidak ada yang terdapat di prioritas 1 dan 2, serta 27 kecamatan pada Prioritas 4 – 6 (87,10 persen).
6. Dari empat kecamatan yang terletak pada Prioritas 3 tersebar 3 kecamatan di Kota Pariaman dan 1 kecamatan di Kota Padang (Kecamatan Bungus Teluk Kabung).
7. Penyebab utama dari penempatan prioritas dari analisa komposit di Kota Padang dan Kota Pariaman adalah aspek persentase angka kesakitan (morbidity) dan khusus di Kecamatan Pariaman Utara juga disebabkan aspek ketersediaan pangan (NCPR).

Nagari Mandiri Pangan

- Dalam rangka antisipasi dan mewujudkan penurunan tingkat kerawanan pangan dan gizi masyarakat melalui upaya bersama pemberdayaan masyarakat secara terintegrasi untuk mencapai Kemandirian Pangan perlu ditetapkan lokasi Nagari/Kelurahan/Desa Pelaksana Mandiri Pangan di Sumatera Barat Tahun 2023.
- Adapun lokasi Nagari/Kelurahan/ Desa Pelaksana Mandiri Pangan di Sumatera Barat Tahun 2022 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 521-531-2022 tanggal 4 Juli 2022 sebanyak **113 Nagari/Kelurahan/Desa**

Program Strategis Tahun 2024

Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2024

No.	Program Strategis	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2024
1	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Jumlah KWT yang dibina - Jumlah KWT yang dibina (rempah) - Jumlah Kelompok Pangan lokal yang dibina	100 KWT KRPL, 52 KWT Rempah dan 12 Kelompok Pangan Lokal
2	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah revitalisasi PPK	100 Unit
3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100 ton beras
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Nagari Mandiri Pangan yang dibina	135 Nagari
5	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah masyarakat yang terdampak dan beresiko rawan pangan dan gizi serta stunting yang dibantu	3.000 KK
6	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	- Jumlah kelembagaan keamanan pangan segar yang dibina - Jumlah sampel Pengawasan Pangan Segar yang beredar di masyarakat yang diuji laboratorium	- 19 Kab/kota - 400 sampel
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi	- Jumlah Roadmap Pangan Lokal yang dilaksanakan	1 dokumen

No.	Program Strategis	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2024
8	Bazar/Pasar Murah TTIC	- Jumlah Distribusi bahan Pangan, Gelar Pangan Murah , Operasi Pasar dan bazar pasar murah yang dilaksanakan - Jumlah Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan yang dilaksanakan	- 10 komoditi pangan pokok strategis - 300 kali bazar
9	Sertifikat Prima Pangan Segar Asal Tumbuhan	- Jumlah Pangan Segar Yang Memiliki Sertifikat Mutu dan Keamanan	- 100 sertifikat
10	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	- Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Yang di Terbitkan Nomor Registernya - Jumlah Registrasi Rumah Kemas yang diterbitkan	- 50 nomor register PSAT - 3 nomor register rumah kemas
11	Laboratorium Keamanan Pangan Segar	Jumlah Laboratorium Keamanan Pangan Segar	1 Laboratorium

TERIMA KASIH

ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

SUKARLI, S.Pt, M.Si.

Plt. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Disampaikan pada Acara *Focus Group Discussion* (FGD) Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan di Setiap Sektor SDA
Padang, 10 Maret 2023

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok :

- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner dan tugas pembantuan.

Fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Peternakan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner
- dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJMD) PROVINSI SUMBAR TAHUN 2022 - 2026

VISI DAN MISI GUBERNUR

VISI :
TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN

MISI 3 :
MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN PRODUKTIFITAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

TUJUAN :
MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI

SASARAN :
MENINGKATNYA PENDAPATAN PETERNAK

SASARAN OPD :
MENINGKATNYA PRODUKSI PETERNAKAN

PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

Prioritas Agenda RPJMD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

“ Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis”

ISU STRATEGIS :

1. Peningkatan pendapatan petani, peternakan, hilirisasi dan pengembangan tata niaga yang berpihak kepada petani
2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang produksi pertanian (peternakan), sarana produksi pemasaran dan permodalan serta kelembagaan petani (peternakan)
3. Optimalisasi peningkatan produktifitas pertanian (peternakan)
4. Optimiliasi nilai tambah dan daya saing produk pertanian (peternakan)
5. Akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi untuk hilirisasi pertanian (peternakan)
6. Optimilisasi ketersediaan, keterjangkauan distribusi, pengawasan dan keamanan pangan
7. Kurang optimalnya pelestarian dan pengembangan sumberdaya genetik ternak lokal
8. Kurang optimalnya usaha pembibitan dan penyediaan bibit ternak lokal yang berkualitas, dengan prinsip “Good Breeding Practices” dan “Good Farming Practices” secara berkelanjutan

Lanjutan....

9. Ketersediaan pakan ternak berkualitas kurang
10. Kompetensi SDM dan kelembagaan peternak
11. Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
12. Kurangnya penyediaan pelayanan publik yang mendukung fungsi pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan

SASARAN PADA RPJMD

Meningkatnya Pendapatan Peternak

- Peningkatan Produksi Peternakan
- Menurunnya Penyakit Hewan Menular Strategis

STRATEGI PADA RPJMD

1. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor peternakan
2. Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna

PROGRAM KERJA DISNAKKESWAN PROV.SUMBAR TAHUN 2023:

6 PROGRAM DAERAH

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
4. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
5. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

2 PROGRAM PUSAT

1. PROGRAM PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN RAKYAT
2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

ANGGARAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

APBD

Pagu Anggaran = Rp. 99.478.563.310,-

APBN

Ditjen PKH = Rp. 30.489.366.000,-

Ditjen PSP = Rp. 1.276.278.000,-

PROGRAM STRATEGIS

Program Strategis	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2023
Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan (benih/bibit)	1. Semen Beku yang tersedia 2. Populasi Sapi yang bertambah 3. Service Per Conception (S/C) yang dicapai	1. 200.000 dosis 2. 0 ekor 3. 2,2
Jumlah sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian, peternakan dan kelautan dan perikanan yang disediakan (unit)	Jumlah UPTD yang meningkat sarana dan prasarananya	5 unit
Jumlah resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen atau produksi baik oleh hama penyakit dan bencana alam yang dapat diantisipasi (resiko)	1. Jumlah Kasus PHMS yang terjadi - Jembrana - Rabies - AI 2. Sampel uji yang diuji	1. - 110 kasus - 110 kasus - 185 kasus 2. 1540 sampel uji
Peningkatan usaha pasca panen pengolahan hasil	Meningkatnya usaha pasca pengolahan hasil di UPH	49,15 %
Peningkatan mutu dan nilai tambah produksi peternakan	Meningkatnya mutu dan nilai tambah produksi peternakan	35 %
Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Produksi komoditas ternak unggas yang bertambah di Sumatera Barat	650.000 ekor
Jumlah produksi kambing	Produksi komoditas ternak kambing yang bertambah di Sumatera Barat	5.000 ekor
Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan)	Terdatanya enterpreneur baru urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.997 orang

ISU STRATEGIS

NO	ISU STRATEGIS	TINDAK LANJUT
1	Penurunan jumlah akseptor sehingga menurunnya jumlah permintaan semen beku akibat adanya wabah PMK dan LSD	1. Meningkatkan kualias pejantan dan semen beku 2. Meningkatkan pelayanan purna jual untuk memantau kualitas produk 3. Sosialisasi keuntungan beternak menggunakan hasil IB
2	PMK dan LSD menyebabkan menurunnya animo masyarakat dalam memelihara ternak	1. Memotivasi masyarakat dan meningkatkan promosi ternak hasil 2. Inseminasi Buatan (IB) 3. Mendorong peningkatan pelayanan IB di masyarakat
3	Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan ketersediaan Fasiltas Kesehatan Hewan yang memadai dan profesional	1. Menginventarisasi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan ternd di masyarakat. 2. Mempersiapkan regulasi, Sumber Daya Manusia, serta sarana dan prasarana sesuai dengan trend kebutuhan masyarakat 3. Membuka akses layanan public yang tersedia pada Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat secara Online sehingga diseminasi informasi dapat terwujud
4	Optimalisasi Penyediaan Benih Bibit Ternak (Unggas dan Ruminansia)	1. Koordinasi dan optimalisasi semua stakeholder yang memberikan pengaruh terhadap proses pengadaan mulai dari perencanaan, persiapan, pengadaan dan monitoring 2. Melibatkan APIP (Inspektorat dalam pelaksanaan kegiatan)
5	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Peternakan (Alsintan)	
6	Lahan UPTD Ternak Ruminansia yang seluas 500 ha belum sepenuhnya dikuasai UPTD Ternak Ruminansia	1. Melakukan pendataan petani yang berkebun dilahan UPTD Ternak Ruminansia 2. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar tidak melakukan replanting tanaman sawit 3. Sudah dilakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait pada tanggal 20 Februari 2023 di UPTD Ternak Ruminansia
7	Ancaman wabah penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	Optimalisasi pengobatan dan vaksinasi ke Kab/Kota se-Sumatera Barat

PERMASALAHAN

NO	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Meningkatkan permintaan pelayanan transaksi pembayaran non tunai	Mengajukan rencana pembayaran transaksi non tunai terhadap stake holder terkait
2	Kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan tindakan pelayanan	1. Melakukan update teknologi (peningkatan sarana prasarana pendukung) yang didukung dengan ketersediaan dana untuk meningkatkan ketersediaan alat – alat kedokteran yang mutakhir untuk mendukung pelayanan pada Rumah Sakit Hewan 2. Meningkatkan sarana dan prasarana (infrasuktur) yang memadai dalam mendukung penambahan jenis layanan yang memerlukan ruangan khusus agar pelayanan tersebut dapat dilakukan secara baik dan professional
3	Kelompok ternak penerima bantuan 1. Kelompok yang di ajukan (pokir) belum sesuai kriteria (Simluhtan) 2. Kesiapan kelompok (SDM, SDA, keuangan) 3. Komitmen kelompok untuk mengambangkan usaha	1. Meningkatkan Koordinasi dengan kab/kota dalam mengumpulkan data kelompok yang direkomendasikan 2. Peningkatan kapasitas kelompok (pembinaan/penyuluhan)
4	Pendistribusian ternak bantuan 1. Kelompok belum mempersiapkan sarana prasarana secara lengkap 2. Cuaca (hujan) 3. Petugas pendamping (provinsi/kab/kota) tidak hadir saat ternak didistribusikan (waktu terlalu sore/malam)	1. Kontrol kondisi kandang sebelum ternak didistribusikan 2. Menyesuikan kondisi cuaca Mengatur jadwal distribusi dan personil yang bertanggung jawab menerima ternak di lokasi
5	Penetapan kelompok penerima bantuan bibit pakan masih sedikit peternak yang mempunyai lahan hijauan pada satu hamparan dengan luas yang dipersyaratkan (bantuan bibit pakan / APBN)	Pemanfaatan lahan secara tumpang sari
6	Populasi dan Produktifitas ternak unggas lokal masih rendah	Memperbanyaj ketersediaan bibit ternak unggas local yang berasal dari bantuan APBN
7	Produksi dan produktivitas pakan ternak unggas masih rendah	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pakan unggas
8	Pengembangan kawasan ternak unggas belum optimal	Penataan Kawasan ternak unggas local lebih diperhatikan
9	Lahan di UPTD ternak Ruminansia belum ada sertifikat dan sudah ditanami sawit masyarakat selama puluhan tahun	Sertifikat lahan harus segera dibuat dengan bantuan bidang asset BPKAD
10	Belum ada batas permanen antara lahan UPTD Ternak Ruminansia dengan lahan yang diperuntukan untuk Pemda Sumatera Barat	Pembuatan batas yang jelas dan permanen

Thank You

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Sumatera Barat

Jl. Rasuna Said No. 68
Padang

Mengurus Hutan dengan Hati

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

ISU STRATEGIS
PEMBANGUNAN KEHUTANAN
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Disampaikan pada :
Focus Group Discussion (FGD) Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan di Sektor SDA

Padang, 10 Maret 2023

KSA/KPA	765.623,24 Ha (18.22%)
HL	775.304,94 Ha (18.45%)
HPT	228.666 Ha (5.44%)
HP	357.089 Ha (8,50%)
HPK	160.200 Ha (3,81%)
APL	1.914.406 Ha (45.57%)

Kawasan Hutan
2.286.883 Ha (54.43%)

Kawasan Hutan Kewenangan Dishut (HL, HPT, HP, HPK)
1.521.260 Ha (36,21%)

FUNGSI KAWASAN HUTAN
SK.8089/MENLHK¬PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 (update)

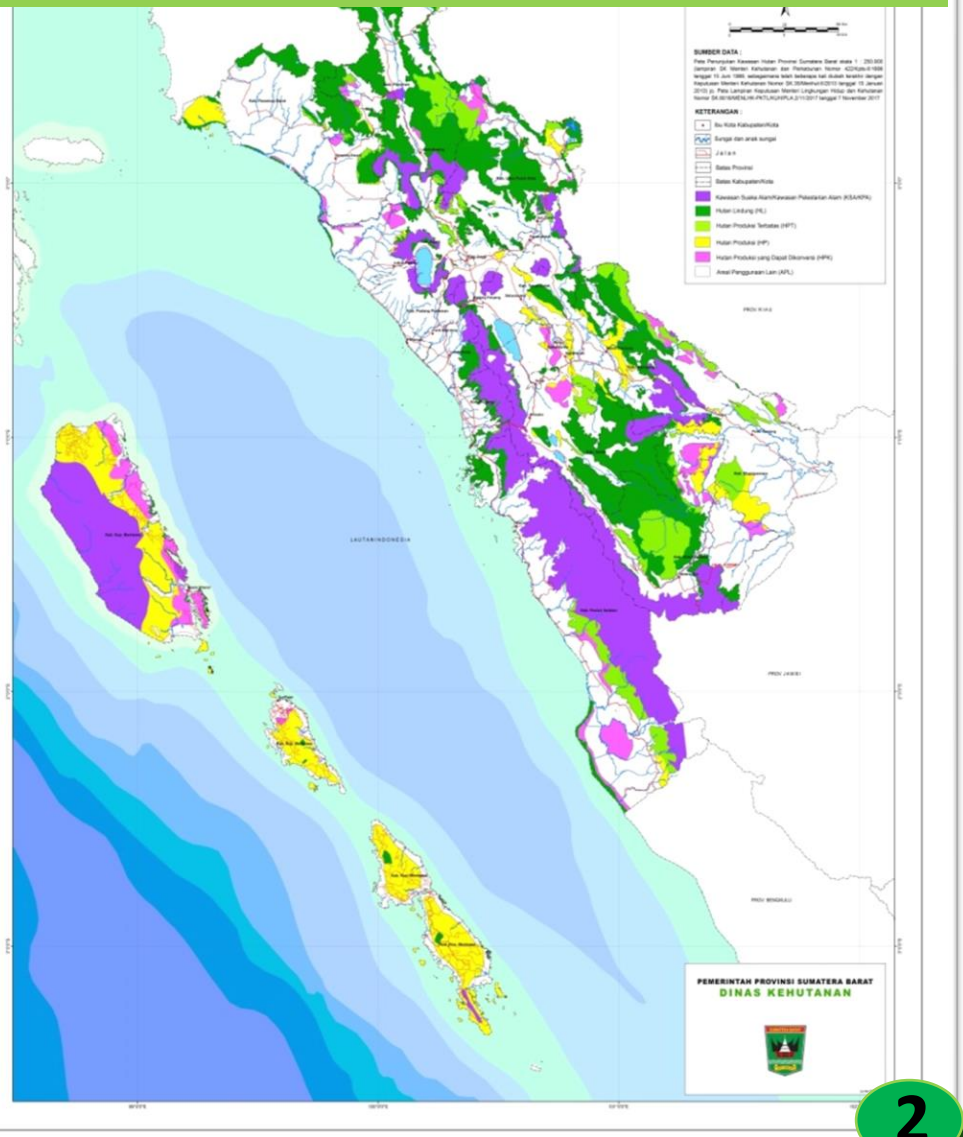

NAGARI/DESA DI DALAM DAN SEKITAR HUTAN

Jumlah Desa/Nagari
1.159

Hutan Konservasi = 365 Nagari
Hutan Lindung = 305 Nagari
Hutan Produksi = 280 Nagari

Dalam/Sekitar Kawasan Hutan
950 Nagari (81,97%)

Luar Kawasan Hutan
209 Nagari (18,03%)

KARAKTERISTIK KAWASAN HUTAN

- IUPHHK-HTI
  4 Unit
- IUPHHK-HA
  3 Unit
- KTH
  453 KLP
- PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
  32 Unit
- PERHUTANAN SOSIAL
  199 Unit

- LUAS HL, HPT, HP
  (1.361.060 Ha)
- Izin
  462.155 Ha (33,96%)
- Potensi Kelola
  898.905 Ha (66,04%)

PBPH DAN PERHUTANAN SOSIAL

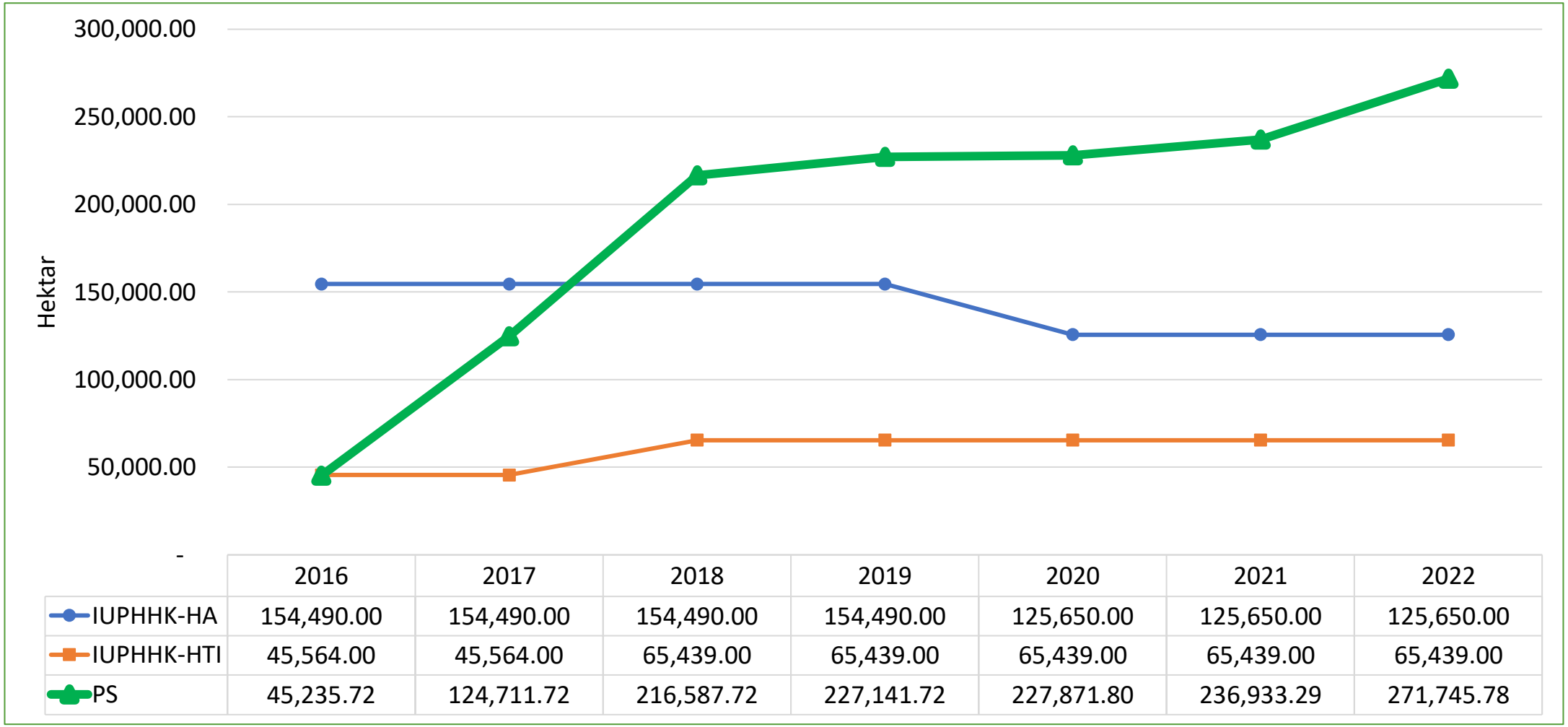

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IUPHHK-HA	154,490.00	154,490.00	154,490.00	154,490.00	125,650.00	125,650.00	125,650.00
IUPHHK-HTI	45,564.00	45,564.00	65,439.00	65,439.00	65,439.00	65,439.00	65,439.00
PS	45,235.72	124,711.72	216,587.72	227,141.72	227,871.80	236,933.29	271,745.78

PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI HUTAN

SURVEY TAHUN 2021

GENDER

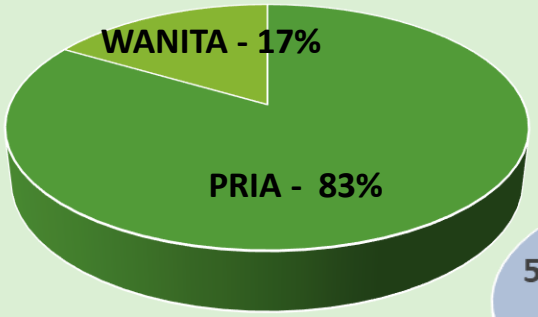

USIA

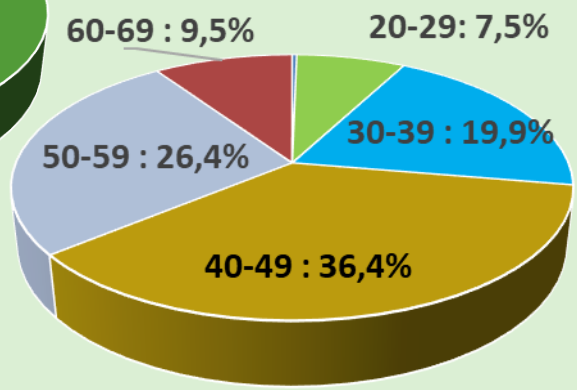

PENDIDIKAN

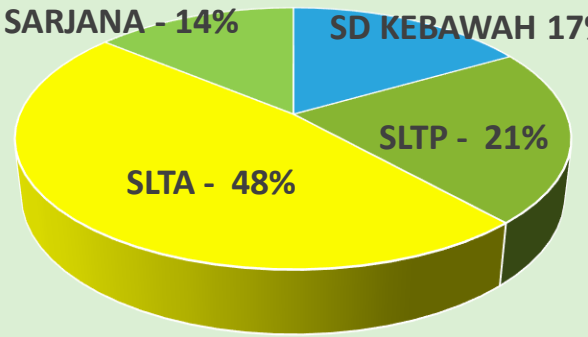

Pendapatan Rerata Per Bulan (2021)
Rp. 1.779.710

SURVEY TAHUN 2022

GENDER

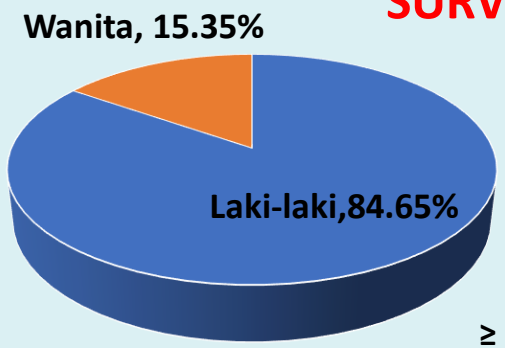

USIA

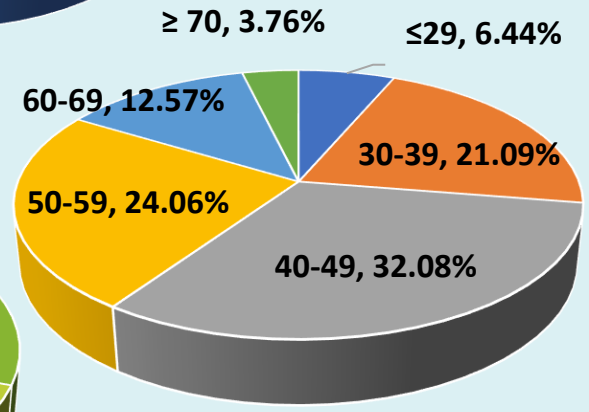

PENDIDIKAN

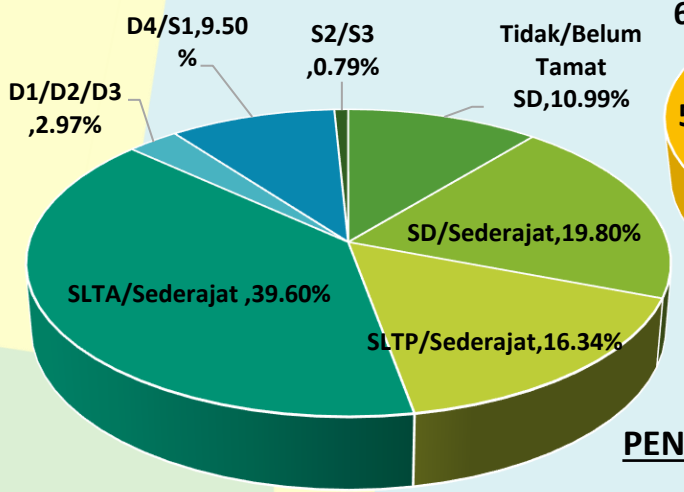

Pendapatan Rerata Per Bulan (2022)
Rp. 1.978.367

PENINGKATAN PENDAPATAN
Rp. 198.657 (11,16%)

Visi, Misi, Prioritas dan Tujuan Strategis RPJMD 2021-2026

VISI

Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan

Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

03 MISI

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

06 MISI

1. Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan
2. Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas

Tujuan OPD

MISI 3 Meningkatkan Nilai Tambah Dan Produktifitas Produk Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan

Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan

IK = Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan

Target: 5%/Tahun

TUJUAN OPD

SASARAN OPD

Meningkatnya Luas Kawasan Hutan yg dikelola Kelompok Masyarakat	Meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan
IK : Luas kawasan hutan yang dikelola (Hektar) Target: 250.000 Ha	IK : Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan (Unit) Target: 100 Unit

MISI 6

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas

IK : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Target: 82,50

TUJUAN OPD

SASARAN OPD

Meningkatkan kualitas hutan dan lahan

IK : Indeks Tutupan Hutan

Target: 59,26

INDIKATOR KINERJA
RENSTRA DINAS KEHUTANAN

2023 : 50.000
2024 : 50.000

1. LUAS KAWASAN HUTAN YANG DIKELOLA (Ha)

2023 : 20
2024 : 20

2. JUMLAH UNIT USAHA BERBASIS KEHUTANAN (Unit)

2023 : 60.55
2024 : 60.12

3. INDEKS TUTUPAN HUTAN (Indeks)

A

2023 : 83.20
2024 : 83.25

4. NILAI AKUNTABILITAS KINERJA OPD (Nilai)

2023 : ≥ 77
2024 : ≥ 77

5. TINGKAT KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN ORGANISASI (Indeks)

TARGET PROGRAM UNGGULAN RPJMD TAHUN 2021-2026

Keputusan Gubernur Sumbar No. 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Progul Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026

1. Jumlah Benih/Bibit Bermutu Pada Sub Sektor Kehutanan Yang Disediakan

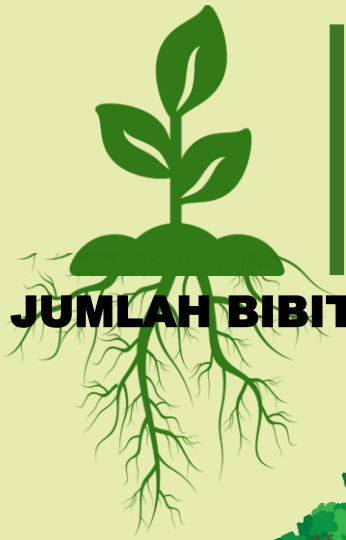

2023 : 800.000
2024 : 1.000.000

1. JUMLAH BIBIT (Batang)

2023 : 2
2024 : 2

2. JUMLAH ARBORETUM (Unit)

2023 : 500
2024 : 500

3. LUAS AGROFORESTRY (Ha)

2023 : 10
2024 : 10

4. JUMLAH KOMODITI YANG DIKEMBANGKAN (Jenis)

TARGET PROGRAM UNGGULAN RPJMD TAHUN 2021-2026

Keputusan Gubernur Sumbar No. 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Progul Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026

2. Jumlah Kegiatan Pengawasan Agroinput Dan Atau Sumber Daya Kelautan, Perikanan Dan Hutan Yang Dilakukan

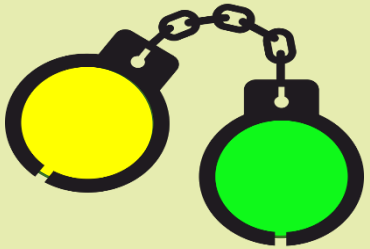

2023 : 2
2024 : 2

a. JUMLAH KASUS TERTANGANI (Kasus)

2023 : 100
2024 : 100

b. JUMLAH PATROLI PAMHUT YANG DILAKUKAN (Kali)

2023 : 100
2024 : 100

c. JUMLAH PATROLI KARHUTLA YANG DILAKUKAN (Kali)

TARGET PROGRAM UNGGULAN RPJMD TAHUN 2021-2026

Keputusan Gubernur Sumbar No. 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Progul Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026

3. Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Produksi Kehutanan Yang Disediakan

2023 : 20
2024 : 20

a. JUMLAH AEP YANG DISEDIAKAN (Unit)

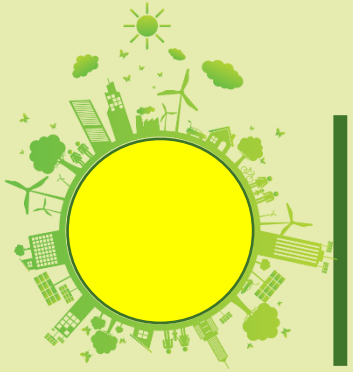

2023 : 20
2024 : 20

b. JUMLAH SARPRAS EKOWISATA YANG DISEDIAKAN (Unit)

2023 : 3.000
2024 : 3.000

c. JUMLAH STUP LEBAH MADU YANG DISEDIAKAN (Stup)

TARGET PROGRAM UNGGULAN RPJMD TAHUN 2021-2026

Keputusan Gubernur Sumbar No. 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Progul Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026

4. Persentase Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Produksi Kehutanan

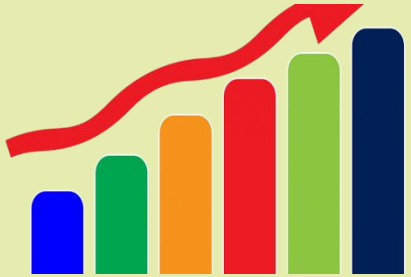

2023 : 20
2024 : 20

PENINGKATAN MUTU DAN NILAI TAMBAH PRODUKSI KEHUTANAN (%)

5. Jumlah Enterpreneur Baru Tercipta

2023 : 500
2024 : 500

JUMLAH ENTREPENEUR BARU URUSAN KEHUTANAN (Orang)

6. Luas KH yang Dikelola Kelompok Masyarakat

2023 : 50.000
2024 : 50.000

LUAS KAWASAN HUTAN YANG DIKELOLA (Ha)

STRUKTUR APBD TA 2023

No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN			
		APBD P 2022	KUAPPAS 2023	APBD 2023	+/ (-) 2022 - APBD 2023
1	**PAD**	**100.000.000**	**42.066.780**	**100.000.000**	**-**
	Retribusi	100.000.000	42.066.780	100.000.000	-
2	**BELANJA**	**87.451.095.660**	**97.432.885.146**	**83.934.962.342**	**(3.516.133.318)**
	Belanja Pegawai	**40.009.233.563**	**46.759.939.702**	**45.085.671.516**	**5.076.437.953**
	Belanja Kegiatan	**47.441.862.097**	**50.672.945.444**	**38.849.290.826**	**(8.592.571.271)**
	- APBD Murni	17.644.411.097	32.210.494.444	28.157.988.826	10.513.577.729
	- POKIR	11.357.000.000	22.000.000	1.582.955.000	(9.774.045.000)
	- DAK	9.332.104.000	9.332.104.000	-	(9.332.104.000)
	- DBH	9.108.347.000	9.108.347.000	9.108.347.000	-

STRUKTUR APBD BERDASAR PROGRAM

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN			
		APBDP 2022	KUAPPAS 2023	APBD 2023	+ / (-) 2022 - APBD 2023
1	BELANJA PENUNJANG URUSAN	50.313.522.230	58.060.311.318	53.864.864.530	3.551.342.300
2	BELANJA URUSAN	37.137.573.430	39.372.573.828	30.070.097.812	(7.067.475.618)
	1 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	23.252.624.460	21.647.167.000	14.750.654.080	(8.501.970.380)
	2 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	225.402.500	400.000.000	400.000.000	174.597.500
	3 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	13.109.546.470	16.620.386.828	14.269.443.732	1.159.897.262
	4 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	550.000.000	705.020.000	650.000.000	100.000.000
	JUMLAH	87.451.095.660	97.432.885.146	83.934.962.342	(3.516.133.318)

STRUKTUR RAPBD TA 2024

No.	URAIAN	RAPBD 2024
1	**PAD**	**100.000.000**
	Retribusi	100.000.000
2	**BELANJA**	**131.744.040.000**
	Belanja Pegawai	**44.185.671.516**
	Belanja Kegiatan	**87.558.368.484**
	- APBD Murni	78.450.021.484
	- POKIR	-
	- DAK	-
	- DBH	9.108.347.000

STRUKTUR RAPBD BERDASAR PROGRAM 2024

NO	JENIS BELANJA		PAGU ANGGARAN RAPBDP 2024
1	**BELANJA PENUNJANG URUSAN**		**60.621.601.000**
2	**BELANJA URUSAN**		**71.122.439.000**
	1	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	23.062.923.000
	2	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	22.662.814.000
	3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	22.981.628.000
	4	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	2.415.074.000
	JUMLAH		**131.744.040.000**

ISU STRATEGIS

MENINGKATNYA KAWASAN HUTAN YANG DIKELOLA DAN UNIT USAHA BERBASIS KEHUTANAN

1

Perluasan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat melalui perhutanan sosial sebagai implementasi spirit keberpihakan pengelolaan hutan dengan melibatkan peran masyarakat dengan upaya peningkatan modal sosial dalam mendukung penyelesaian konflik dan hutan adat, peningkatan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan untuk peningkatan pendapatannya

2

Optimalisasi pengelolaan wilayah kelola Perhutanan Sosial melalui pendampingan kelompok, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan makro dan pembangunan daerah, koordinasi antara Institusi yang menangani urusan pembangunan daerah ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat

3

Meningkatkan nilai tambah produk hasil hutan dan jasa lingkungan secara berkelanjutan melalaui peningkatan kapasitas SDM, Sarpras Ekowisata, Alat Ekonomi Produktif, Bibit Unggul, peningkatan kualitas dan pemasaran produk

ISU STRATEGIS

MENINGKATNYA KUALITAS HUTAN DAN LAHAN

1

Meningkatkan resiliensi ekosistem hutan terhadap perubahan iklim melalui upaya mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi jumlah hotspot dan luas areal yang terbakar, koordinasi dan pelaporan hasil inventarisasi dan pemantauan efek gas rumah kaca, penanganan isu-isu terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta percepatan penanganan pengaduan perkara lingkungan hidup dan kehutanan

2

Meningkatkan pengamanan hutan dan penanganan illegal logging melalui pemantapan koordinasi, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, patroli dan operasi serta penegakan hukum, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan, serta peningkatan peran serta masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari dan Masyarakat Peduli Api

3

Melanjutkan program rehabilitasi hutan dan lahan (sipil teknis dan vegetatif), diarahkan kepada peningkatan ketahanan daya dukung air dan tanah, utamanya pengelolaan dan operasionalisasi KPH serta pengelolaan hutan rakyat.

Memperkuat data dan informasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Budidaya Perkebunan terutama Kelapa Sawit

TANTANGAN UNTUK MENDUKUNG VISI MISI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1. Kapasitas , Kuantitas dan Kompetensi SDM Kehutanan
2. Dukungan Perencanaan dan Penganggaran yang memadai
3. Inovasi Pengembangan Sumber Daya Sektor Kehutanan
4. Crosscutting & Kolaborasi Pentahelix untuk Peningkatan Pendapatan Petani Hutan & Lingkungan Hidup Berkualitas
5. Strategi Pemasaran dan Peningkatan Nilai Tambah Kualitas Produk Sektor Kehutanan
6. Dukungan Kebijakan Pengembangan HHBK dan Jasling pada Perhutanan Sosial

Ir. Yozarwardi Usama Putra, S.Hut, M.Si, IPU
(Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumbar)

081271501266

Yozarwardi Yoz

Yozarwardi Yoz

yozarwardi.usama1234@gmail.com

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dr.Ir.Reti Wafda,M.Tp
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Visi

TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN

7 Misi

1. Meningkatkan SDM yang berakhlak mulia, sehat berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah
3. **Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**
4. **Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil menengah serta ekonomi digital**
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. **Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

TARGET KINERJA TAHUN 2022-2026

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL 2021	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
							2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya pendapatan	1. Jumlah pendapatan nelayan Rp/org/th	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	- Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton/th	220.615	222.693	225.081	227.546	230.081	232.762
				-Presentase peningk. prod,perik. tangkap	%	0,93	0,99	1,07	1,09	1,11	1,17
		2. Jumlah pendapatan pembudidaya Rp/org/th	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	- Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton/th	256.747	262.256	274.280	284.467	295.226	306.934
				-Presentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	3,32	3,33	3,39	3,71	3,78	3,97

TARGET KINERJA TAHUN 2022 -2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL 2021	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
						2022	2023	2024	2025	2026
	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil atau menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Persentase Produksi Olahan Perikanan	%	6,30	6,49	7,26	7,95	8,05	11
		Meningkatnya hasil pemasaran perikanan	Nilai ekspor hasil perikanan (Milyar)	milyar	153,76	155,50	156,85	158,42	160	161,60
		Tercapainya Target 100 ribu Enterpreneur	Jumlah enterpreneur perikanan	Orang	150	350	400	450	550	650

TARGET KINERJA TAHUN 2022-2026

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL 2021	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
							2022	2023	2024	2025	2026
2.	Menigkatkan pengelolaan lingkungan perairan	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan	1. Meningkatnya pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	%	41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	70,59
			2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang partisipatif dan bertanggung jawab	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku	%	80	82	84	86	90	92

CAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	0.99	2.90	292.93
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	3.33	3.36	100.90
3	Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan	- Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar)	155.30	272.35	175.37
4	Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	- Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	6.49	10.03	154.55
5	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan	- Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan-Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	47.06	49.26	104.67
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,12)	80.06	99.93
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	- Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayan Internal Organisasi	B (82,00)	82,00	100

PROGRAM UNGGULAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

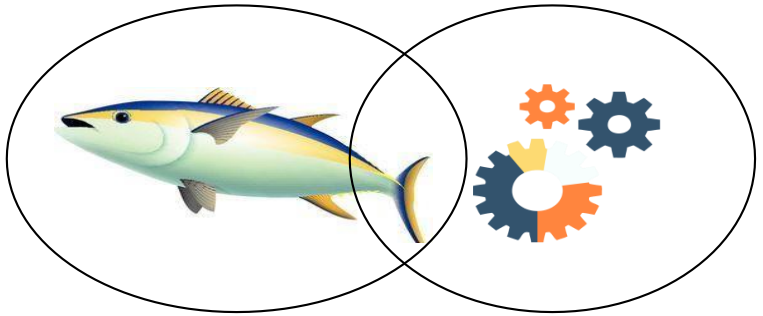

1	2	3	4	5
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

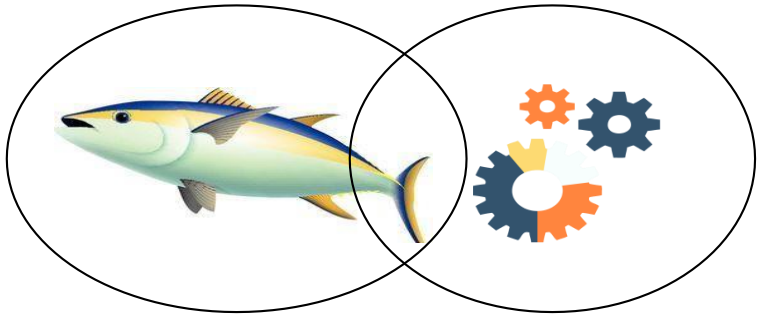

1. PENGEMBANGAN KAWASAN KONSERVASI
2. PENANGKAPAN TERUKUR
3. BUDIDAYA BERBASIS EKSPOR
4. HILIRISASI PRODUK PERIKANAN
5. PENANGANAN SAMPAH LAUT

POSISI SUMATRA BARAT SANGAT STRATEGIS DI TENGAH PULAU SUMATRA, INDONESIA

NAD

MEDAN

KUALA LUMPUR

SINGAPURA

P. BARU

PADANG

JAMBI

PALEMBANG

BENGKULU

LAMPUNG

JAKARTA

Pelabuhan Meulaboh Kapacity 6.000 Ton

Pelabuhan Sibolga Kapasitas 8.000 Ton

Pelabuhan Teluk Bayur Kapasitas 40.000 ton

Pelabuhan Pulau Bay Kapasitas 9.000 ton

Pelabuhan Tanjung Karang Kapasitas 19.000 Ton

TANTANGAN RPJPN 2025 - 2045

Estimasi Potensi, JTB, dan Tingkat Pemanfaatan SDI di WPPNRI.

No.	WPPNRI 572			
	Jenis Ikan	Potensi	JTB (ton)	Tingkat Pemanfaatan (%)
1.	Ikan Pelagis Kecil	479.503	431.553	0.2
2.	Ikan Pelagis Besar	438.877	219.439	1.1
3.	Ikan Demersal	204.500	143.150	0.9
4.	Ikan Karang	33.429	16.715	1.1
5.	Udang Penaeid	35.560	17.780	1.5
6.	Lobster	2.722	1.361	1.6
7.	Kepiting	6.787	6.108	0.1
8.	Rajungan	2.533	1.267	1.6
9.	Cumi - cumi	26.039	23.435	0.4
	Jumlah Potensi	**1.229.950**	**910.808**	

PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

NO	TAHUN	VOLUME PRODUKSI (Ton)	NILAI (Rp)
1.	2018	223.445	4.969.527.248.000
2.	2019	224.620,2	5.767.676.204.000
3.	2020	216.160,6	5.674.728.050.000
4.	2021	211.930,9	5.093.187.117.000
5.	2022	218.688,65	6.495513.186.000

JUMLAH NELAYAN LAUT TAHUN 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kota Pariaman	1.183
2.	Pesisir Selatan	14.978
3.	Padang Pariaman	1.609
4.	Kota Padang	5.265
5.	Pasaman Barat	12.351
6.	Kepulauan Mentawai	5.601
7.	Agam	2.568
	Total	**43.555**

Nelayan Laut tersebar di 7 Kabupaten wilayah Pesisir
di Provinsi Sumatera Barat

DATA KAPAL PERIKANAN TAHUN 2021

No	Kabupaten/Kota	Perahu Tanpa Motor	Perahu Motor Tempel	Kapal Motor		
				<5 GT	5 – 30 GT	> 30 GT
1	Pesisir Selatan	298	3.807	0	643	31
2	Padang	0	1.039	0	236	42
3	Agam	8	852	1	100	0
4	Padang Pariaman	8	793	0	0	0
5	Kota Pariaman	0	487	0	24	2
6	Kepulauan Mentawai	1.792	4.201	3	0	0
7	Pasaman Barat	0	2.556	1.171	138	23
	TOTAL	2.106	13.735	1.175	1.141	98

PELAYANAN PELABUHAN PERIKANAN

- Pabrik Es
- Coldstorage
- Instalasi Air Bersih
- Tempat Pelelangan Ikan
- Tambat Labuh / Dermaga
- Kedai Pesisir
- Mess
- Aula
- Bengkel / Docking
- Mushalla
- Penerbitan SLO dan SPB

Keragaan Perikanan Budidaya

POTENSI BUDIDAYA LAUT

Potensi budidaya laut : 4.381,90 Ha
Daerah Potensi budidaya laut :
Mentawai, Pesisir Selatan,
Kota Padang dan Pasaman Barat

Pemanfaatan : 50 Ha

Budidaya Laut :
1. Budidaya Lobster (akan dikembangkan)
2. Budidaya Kepiting (akan dikembangkan)
3. Budidaya Kerapu (sudah berkembang)
4.Budidaya Rumput Laut (akan dikembangkan)

DATA TAMBAK UDANG
PROVINSI SUMATERA BARAT 2022

No	Kab/Kota	Jumlah Pelaku usaha	Jumlah Petak	Luas Area (Ha)	Produksi (ton)
1	Kab. Padang Pariaman	62	509	109,5	1.815.2
2	Kab. Agam	10	96	23.4	58.250
3	Kab. Pesisir Selatan	2	80	25.5	1.323
4	Kota Padang	8	42	13.6	63.1
	Jumlah	82	1.352	172	4.731,58

3.Keragaan Pengolahan & Pemasaran Hasil Perikanan

PRODUKSI OLAHAN HASIL PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

Disamping ikan kering/asin dan ikan asap, melalui pembinaan yang dilakukan telah muncul jenis-jenis olahan baru yang mempunyai nilai tambah tinggi seperti :

- **Rendang, abon, sate,nugget, dendeng ikan tuna, lele asap, abon lele, stick lele, dendeng tulang ikan, crispy ikan teri, maco, ladu, sala lauak, kerupuk sala, amplang**
- **Frozen ikan (bakso, nugget, sosis, otak-otak, tahu tuna, empek2 dll)**

Bakso Ikan Tuna

NO	PRODUKSI	2017 ton	2018 ton	2019 ton	2020 ton	2021 ton
1.	OLAHAN IKAN	11.953,8	13.579,7	17.352,7	9.215,56	9.118,30

JUMLAH UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI)
TAHUN 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah UPI (KUSUKA)
1	Kab. Kep. Mentawai	19
2	Kab. Pesisir Selatan	398
3	Kab. Solok	141
4	Kab. Sijunjung	69
5	Kab. Tanah Datar	9
6	Kab. Padang Pariaman	259
7	Kab. Agam	114
8	Kab. Lima Puluh Kota	10
9	Kab. Pasaman	20
10	Kab. Solok Selatan	2
11	Kab. Dharmasraya	8
12	Kab. Pasaman Barat	80
13	Kota Padang	262
14	Kota Solok	3
15	Kota Sawahlunto	1
16	Kota PadangPanjang	21
17	Kota Bukittinggi	20
18	Kota Payakumbuh	52
19	Kota Pariaman	101
	TOTAL	1.589

EKSPOR IKAN SUMATERA BARAT TAHUN 2017 – 2021

TAHUN	VOLUME EKSPOR (Ton)	REALIASI NILAI EKSPOR	
		(Rp.)	(USD)
2017	2.954,84	206.577.969.000	15.286.219,2
2018	3.018,96	203.116.977.000	14.368.773,0
2019	3.039,27	234.548.082.639	16.753.434,5
2020	2.149,63	165.122.783.239	11.794.484,5
2021	3.887,57	230.620.299.517	16.472.878,54

Ekspor Produk Perikanan di Sumbar

Nilai Ekspor Sumbar (miliar Rp)

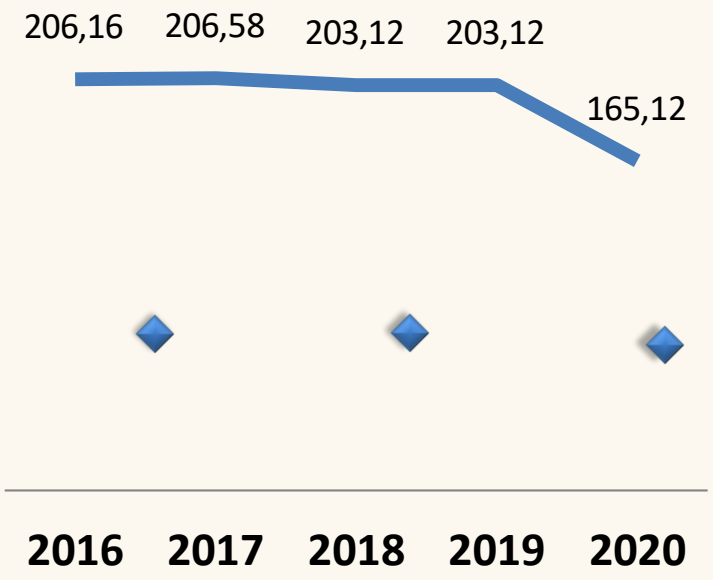

Nilai Komoditas Ekspor Utama, 2020 (miliar Rp)

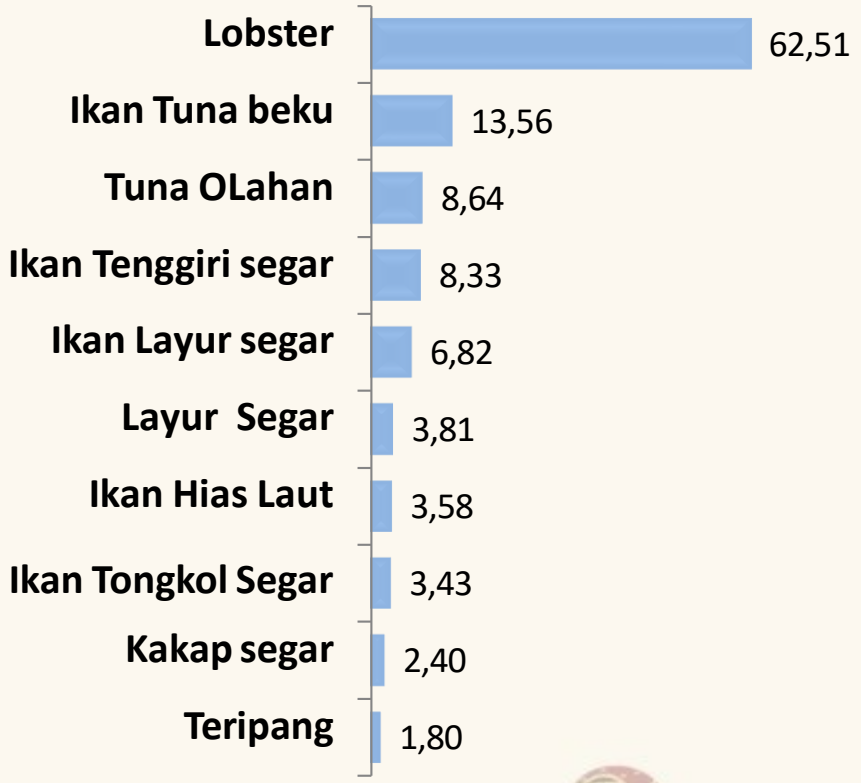

Sumber: DKP Sumbar 2021, diolah RDI

KAWASAN KONSERVASI DAERAH (KKD) DI SUMATERA BARAT

Status Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Sumatera Barat

STATUS KAWASAN KONSERVASI DAERAH (KKD) di Sumatera Barat Serta Target Konservasi

No.	KKPD di Wilayah	Nama Kawasan	No. SK	Luas Kawasan (Ha)	Target Konservasi
1.	Kab. Mentawai	Taman Wisata Perairan Selat Bunga Laut	Kepmen KP No. 22 28 Februari 2018	129.566,00	Mangrove, terumbu karang, ikan Balong Padang, Napoleon
2.	Kabupaten Pesisir Selatan	Taman Perairan	Kepmen KP No. 2 104 tahun 2021 tanggal 18 November 2021	175.583,56	Terumbu Karang, Penyu
3.	Kota Padang	Taman Perairan	Kepmen KP No. 2 105 tahun 2021 tanggal 18 November 2021	2.188,70	Terumbu Karang
4.	Kota Pariaman	Taman Perairan	Kepmen KP No. 2 106 tahun 2021 tanggal 18 November 2021	11.778,22	Terumbu Karang, penyu
5.	Batang Gasan Padang Pariaman	Taman Perairan	Kepmen KP No. 2 107 tahun 2021 tanggal 18 November 2021	735,93	Terumbu Karang,penyu
6.	Kabupaten Pasaman Barat	Taman Perairan	Kepmen KP No. 2 tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022	6.122,14	Terumbu Karang,penyu
7.	Agam		Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 5236 – 170 tahun 2017	12.000	
			Jumlah Total	337.975,5	
			Jumlah ditetapkan	325.975,5	
			Jumlah Belum ditetapkan	12.000	

ISU DAN TANTANGAN

a. Usaha di bidang perikanan baik perikanan tangkap, budidaya maupun pengolahan hasil perikanan masih didominasi usaha skala kecil dan menengah
b. Kebutuhan benih ikan untuk usaha budidaya laut dan payau belum terpenuhi perlu pengembangan UPR yang bersertifikat
c. Pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan belum optimal
d. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan
e. Praktek penangkapan ikan yang merusak ekosisitem dan mengancam kelestarian sumberdaya ikan (destructive fishing dan IUU fishing)
f. Armada kapal Perikanan diatas 30 GT yang menangkap ikan di wilayah pantai barat harusnya bisa mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan Bungus
g. Banyak dipasang rumpon oleh nelayan diluar Sumatera Barat

h. Terjadinya degradasi ekosistem laut dan pesisir serta perairan umum.
i. Pemanansan Global, Perubahan iklim , abrasi dll
k. Pemanfaatan lahan usaha perikanan yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah.
l. Ekspor hasil perikanan melalui provinsi lain
m. Tingginya biaya produksi perikanan budidaya karena harga pakan yang selalu meningkat
n. Belum tercukupinya kebutuhan BBM untuk Kapal Perikanan di Provinsi Sumatera Barat, dimana kebutuhan solar mencapai 39 juta liter/tahun sedangkan pertalite 51.7 juta liter/tahun.
o. Kesehatan laut → Banyaknya sampah di laut

SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN MASIH PERLU DITINGKATKAN

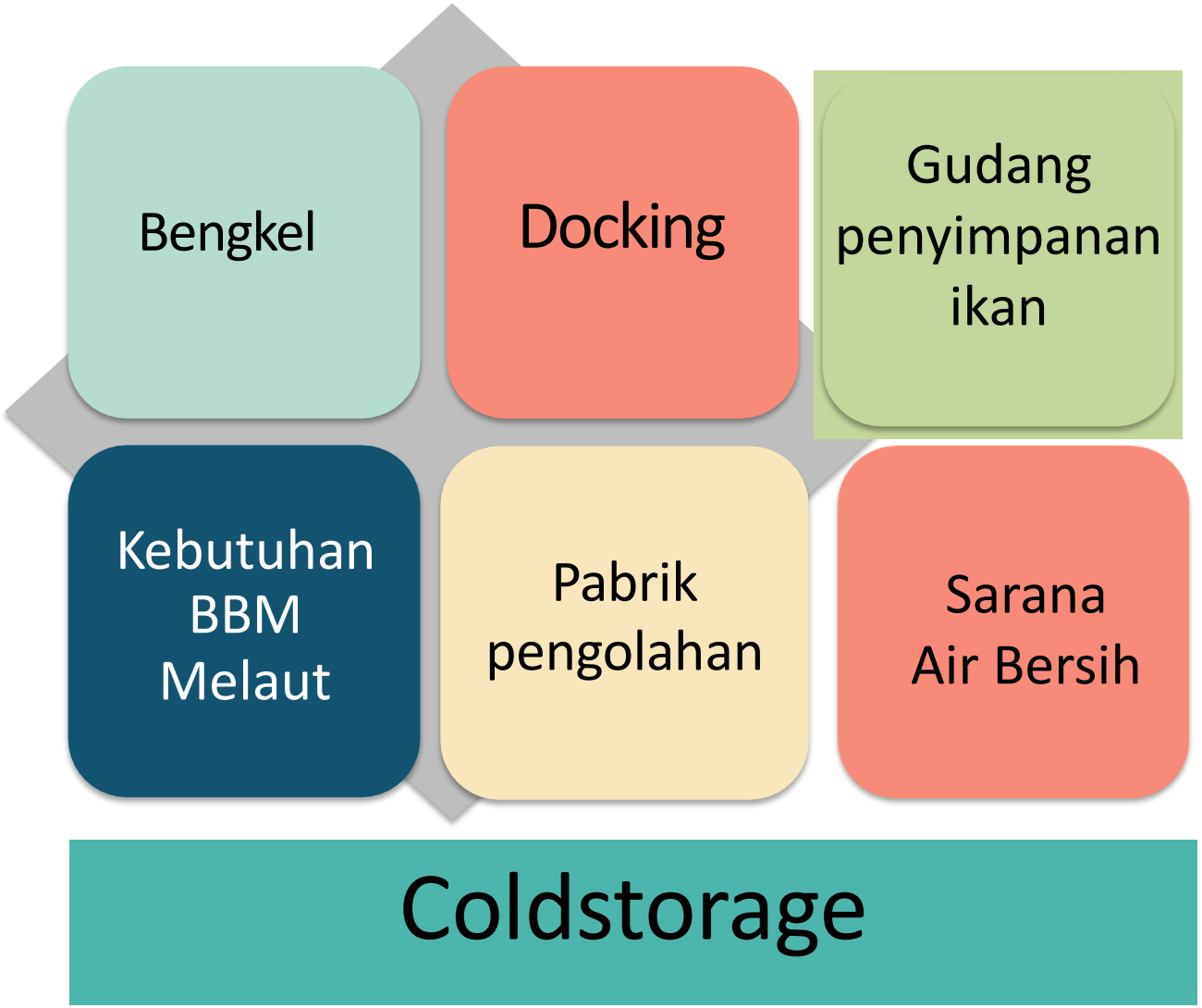

TERIMA KASIH

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Visit Beautiful
west sumatra 2023

Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Pertanian Sumatera Barat

Dr. Ferdinal Asmin, S.TP, MP
(Sekretaris Disbuntanhor Sumbar)

Sistematika Penyajian

Latar Belakang	Menjelaskan isu internasional, nasional dan daerah
Gambaran Petani Sumbar	Menjelaskan karakteristik sumber daya petani
Potensi Pertanian Sumbar	Menjelaskan potensi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
Permasalahan dan Isu	Menjelaskan permasalahan dan isu strategis, dan kerangka logis peningkatan pendapatan petani

Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Asia Timur dan Pasifik

TABLE 2.1.1 East Asia and Pacific forecast summary

(Real GDP growth at market prices in percent, unless indicated otherwise)

	2019	2020	2021e	2022f	2023f	2024f	Percentage point differences from January 2022 projections: 2022f	2023f
EMDE EAP, GDP[1]	**5.8**	**1.2**	**7.2**	**4.4**	**5.2**	**5.2**	**-0.7**	**0.0**
GDP per capita (U.S. dollars)	5.2	0.6	6.6	3.9	4.7	4.7	-0.7	0.0
(Average including countries that report expenditure components in national accounts)[2]								
EMDE EAP, GDP[2]	5.8	1.2	7.4	4.4	5.2	5.1	-0.7	0.0
PPP GDP	5.7	0.8	7.0	4.5	5.2	5.1	-0.6	0.0
Private consumption	6.1	-2.1	10.0	3.9	6.2	6.2	-2.1	0.0
Public consumption	7.1	3.5	4.4	6.5	3.1	3.4	0.4	-2.8
Fixed investment	4.5	3.0	2.8	4.4	5.3	5.0	-0.1	1.0
Exports, GNFS[3]	3.1	-1.2	15.1	4.6	4.9	4.7	-0.3	0.2
Imports, GNFS[3]	0.3	-3.7	10.4	5.8	6.0	6.0	-0.2	0.1
Net exports, contribution to growth	0.7	0.6	1.3	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0
Memo items: GDP								
China	6.0	2.2	8.1	4.3	5.2	5.1	-0.8	-0.1
East Asia excluding China	4.8	-3.7	2.6	4.8	5.4	5.4	-0.2	0.4
Indonesia	5.0	-2.1	3.7	5.1	5.3	5.3	-0.1	0.2
Thailand	2.2	-6.2	1.6	2.9	4.3	3.9	-1.0	0.0
Commodity exporters	5.1	-1.8	2.0	4.8	5.9	6.0	-0.1	1.1
Commodity importers excl. China	4.6	-5.4	3.1	4.8	5.1	4.9	-0.3	0.0
Pacific Island Economies[4]	4.4	-5.3	-0.2	3.7	3.6	3.1	-0.7	-0.1

Source: World Bank.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sumber : Website BPS RI (2023)

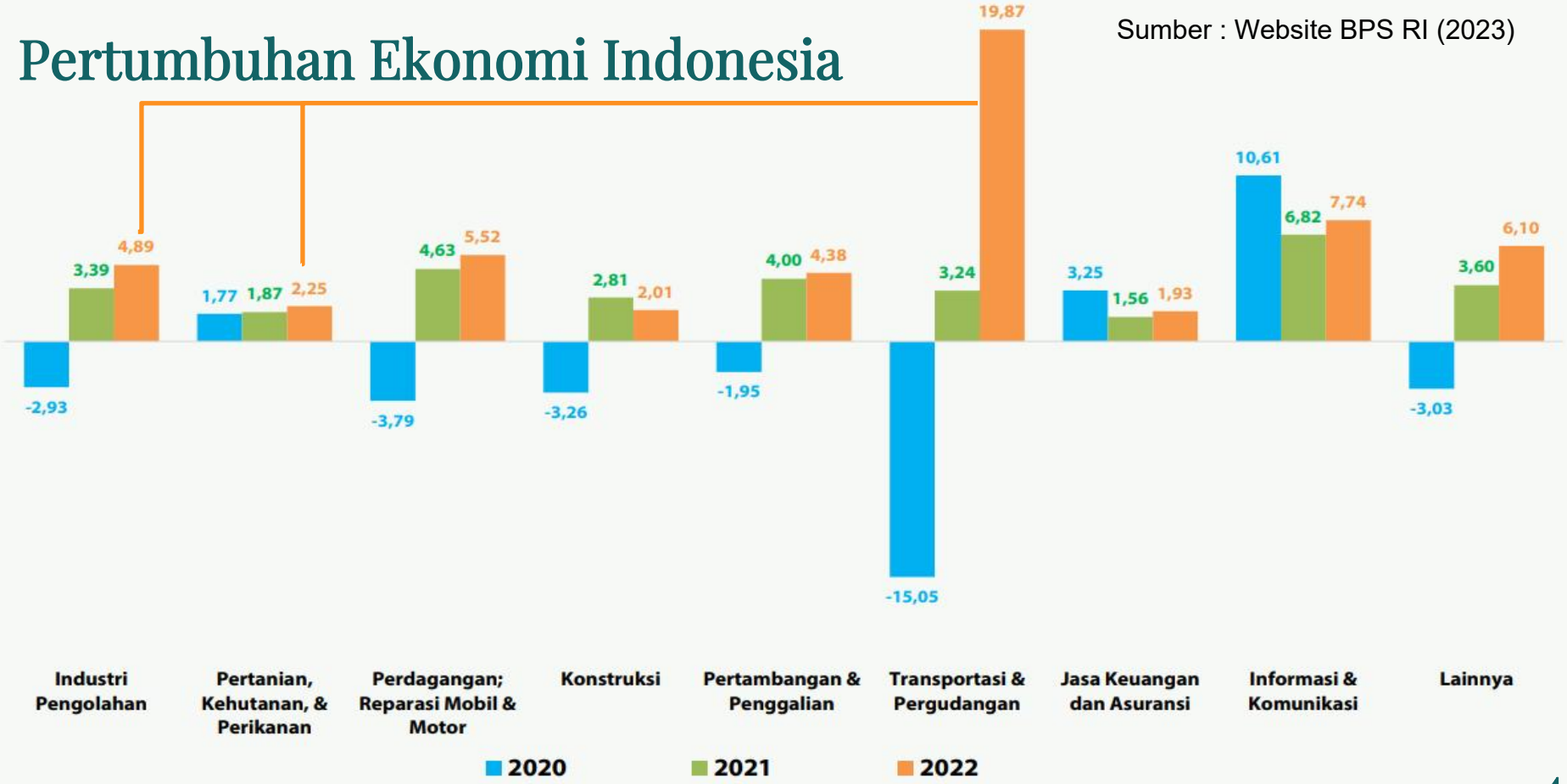

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat

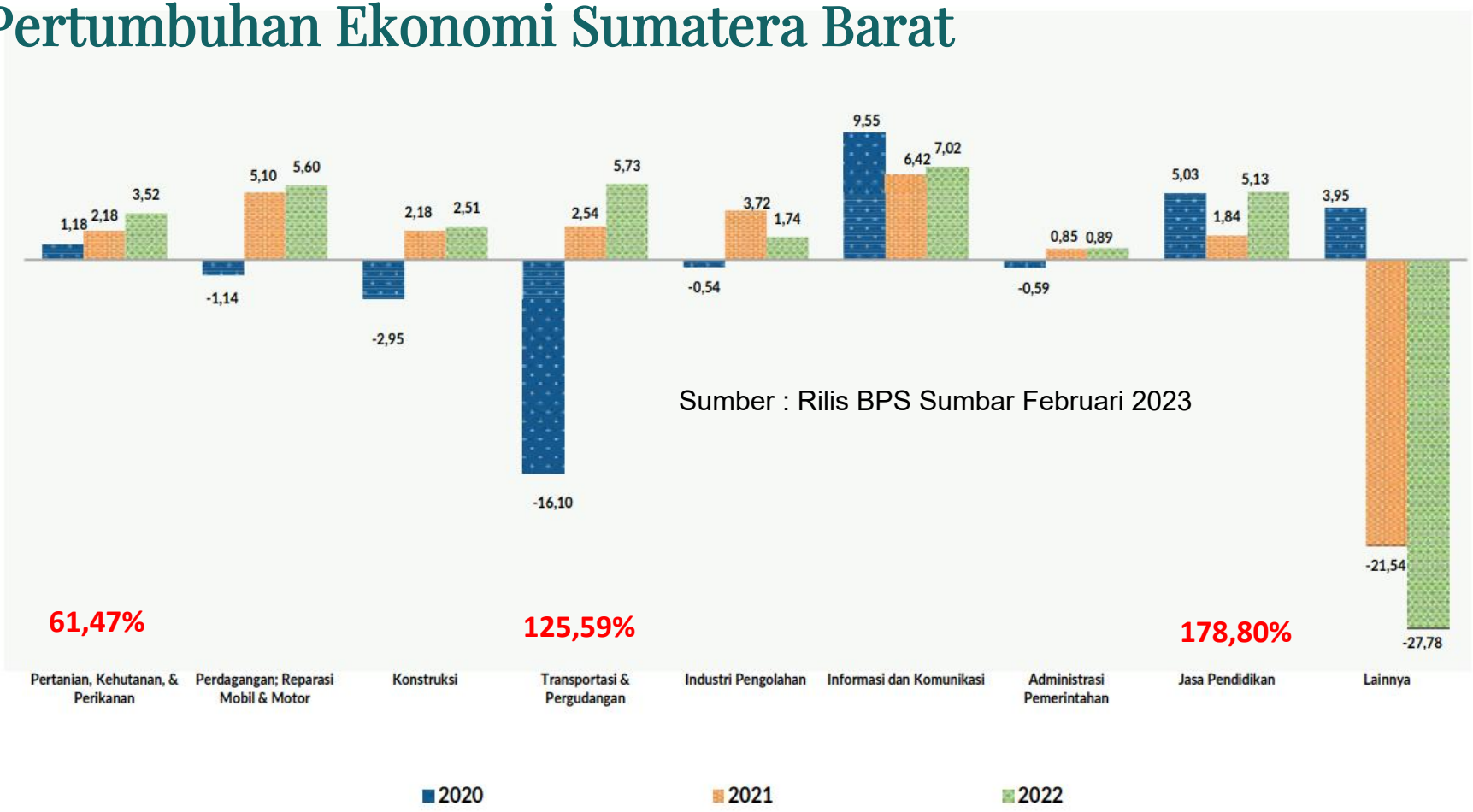

Sumber : Rilis BPS Sumbar Februari 2023

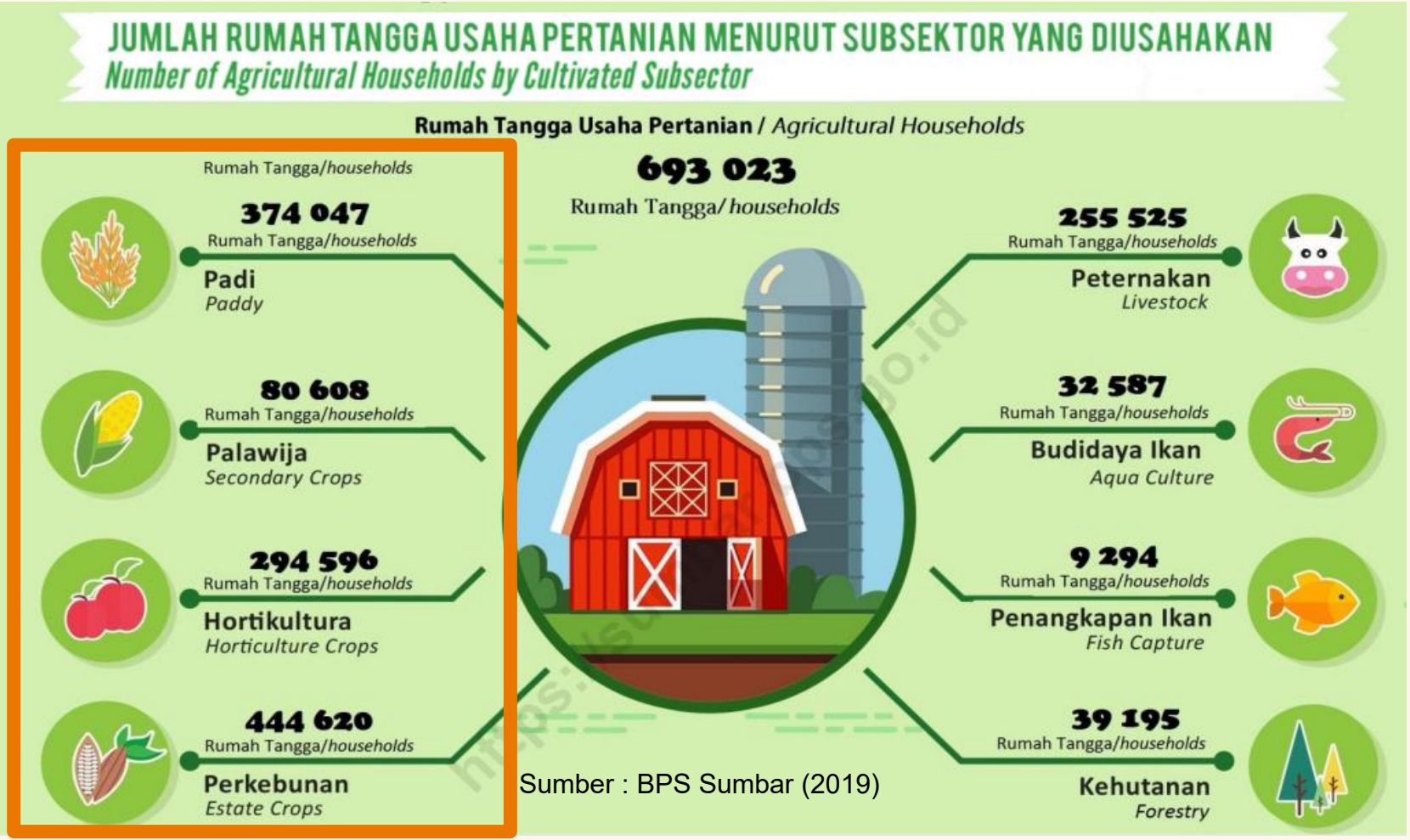

Sumber : BPS Sumbar (2019)

Jumlah petani/nelayan menurut kelompok umur

Sumber : BPS Sumbar (2019)

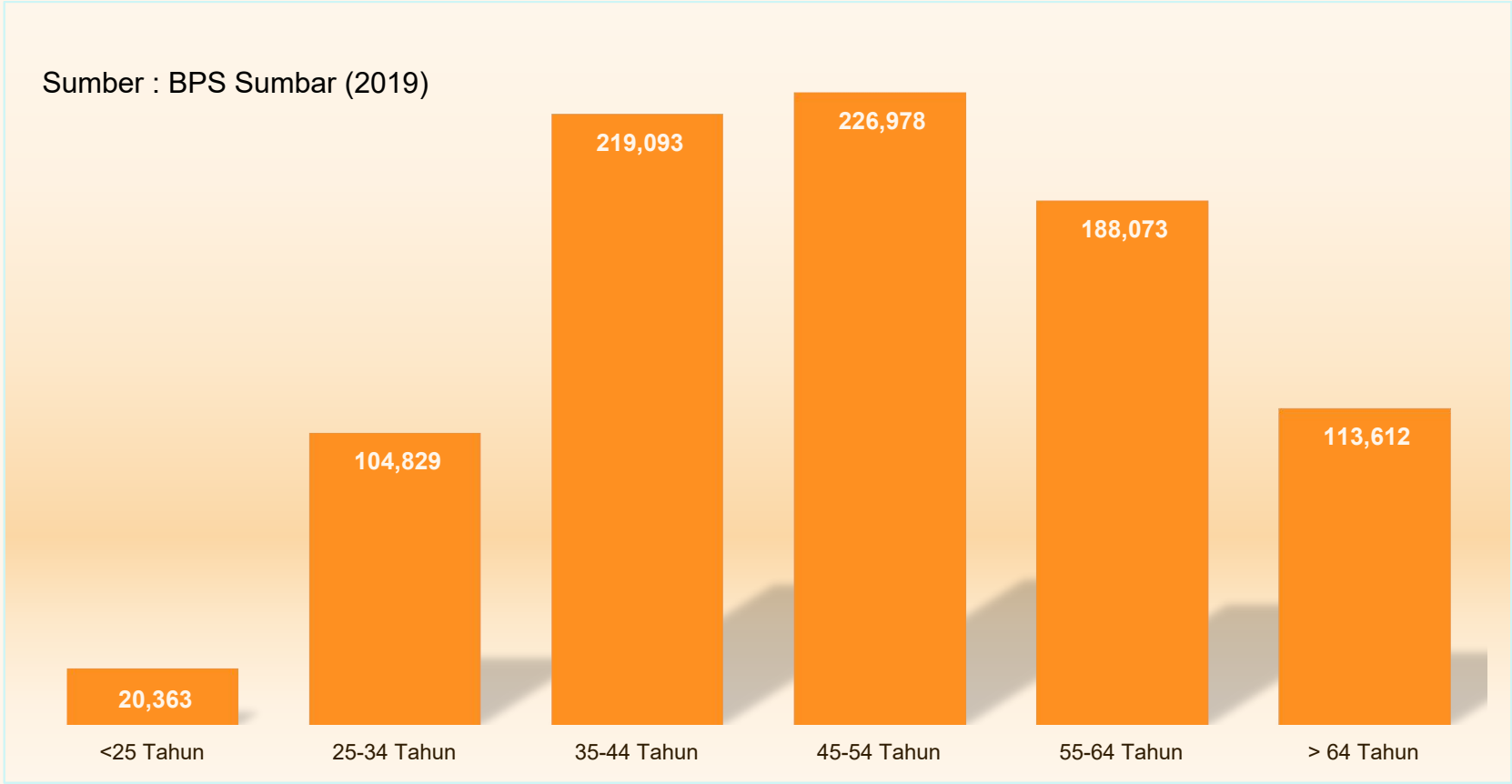

Tingkat Pendidikan Petani/Nelayan di Sumatera Barat

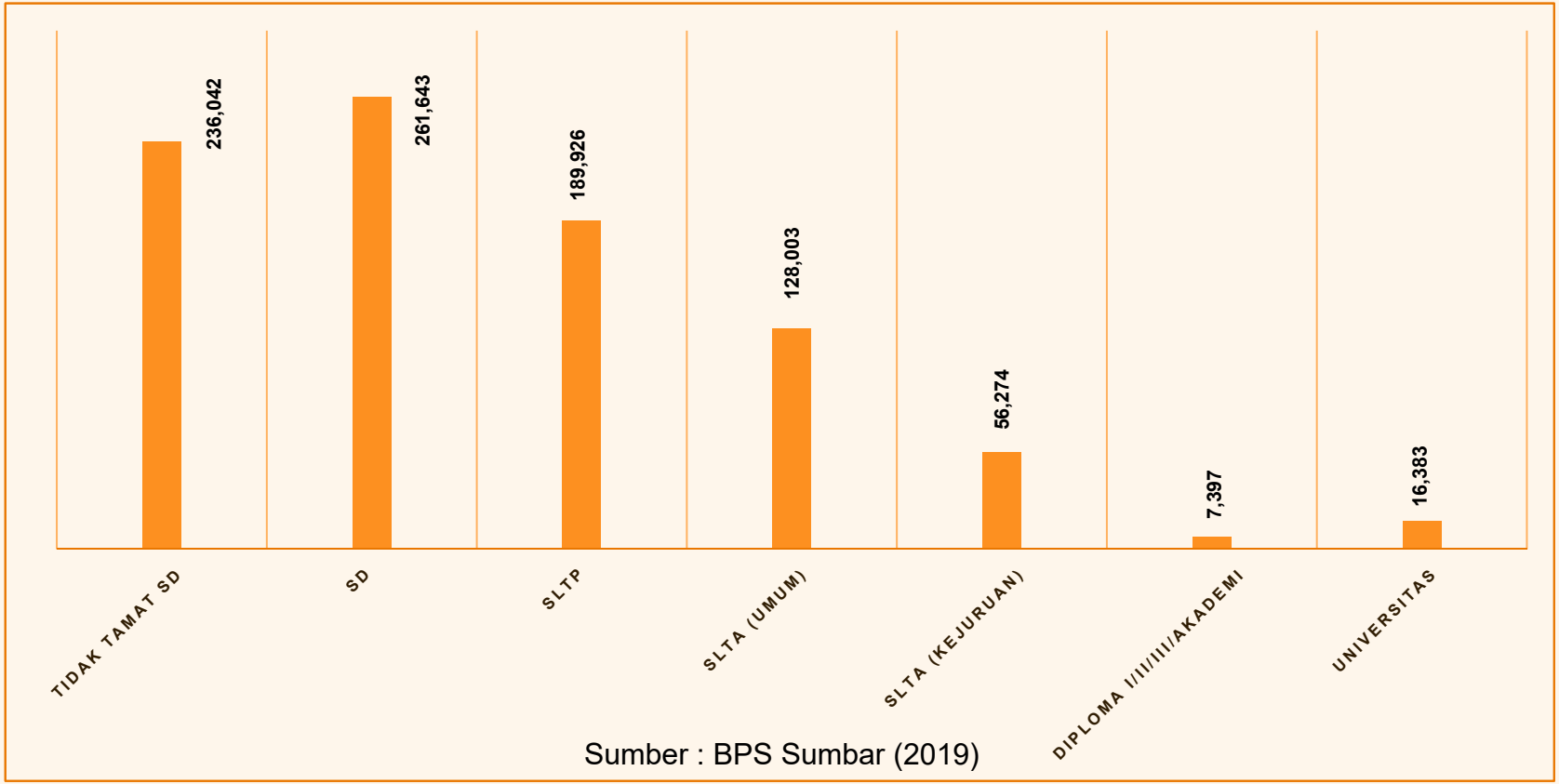

Sumber : BPS Sumbar (2019)

Luas kepemilikan lahan Rumah Tangga Petani/Nelayan di Sumatera Barat

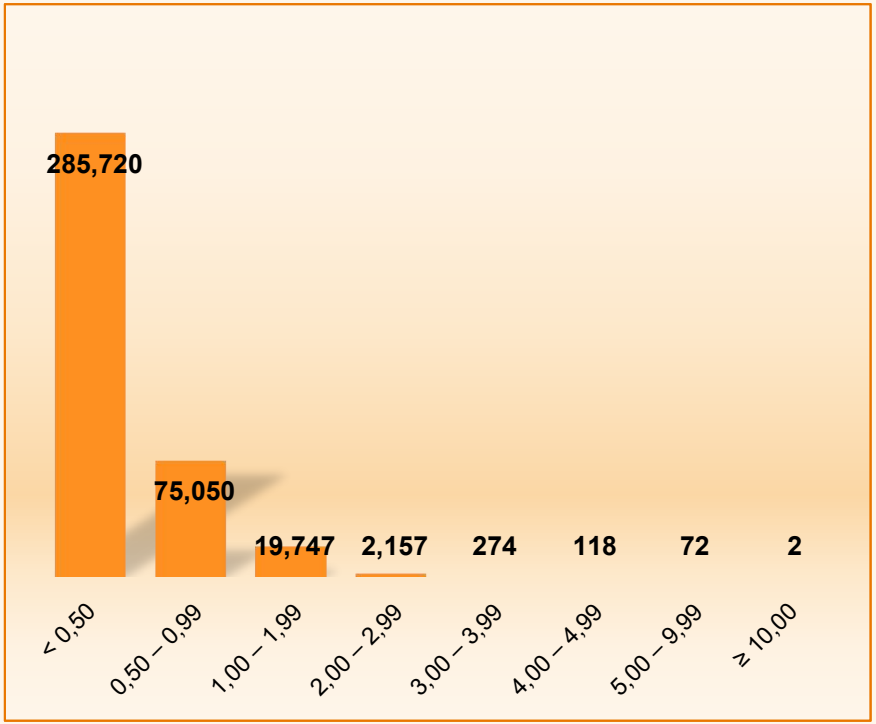

Sawah (ha)

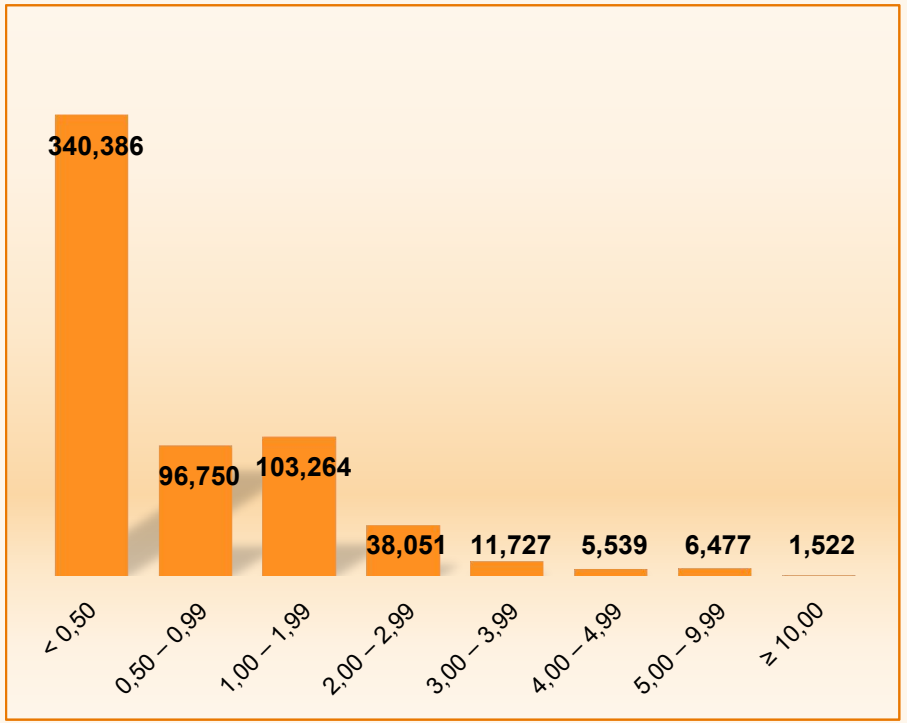

Bukan Sawah (ha)

Sumber : BPS Sumbar (2019)

Sumbar sebagai Produsen Pangan dan horti

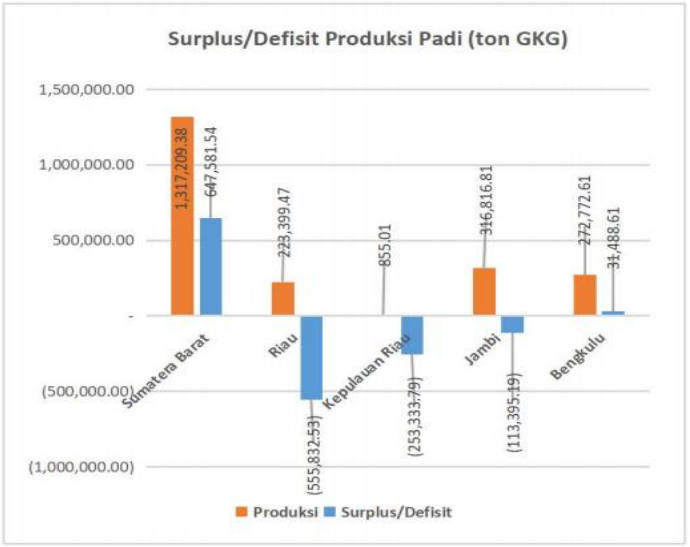

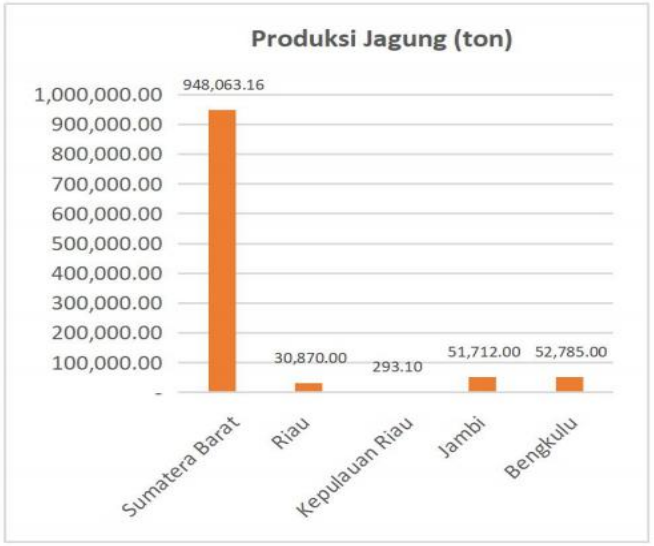

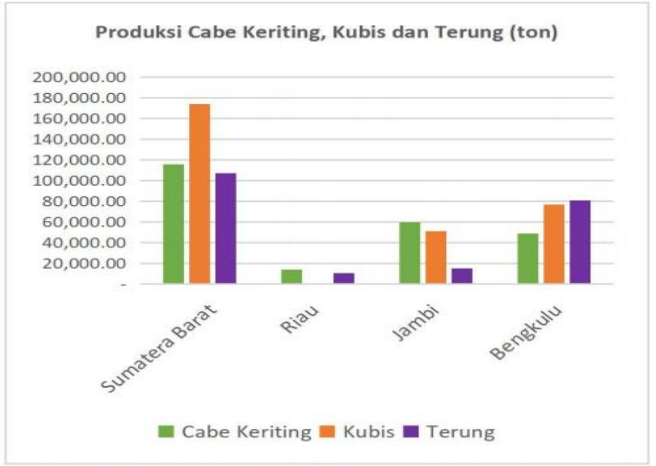

Sumber: BPS Sumbar (2022); BPS Riau (2022); BPS Kepri (2022); BPS Jambi (2022); BPS Bengkulu (2022)

Sumbar sebagai Produsen Horti

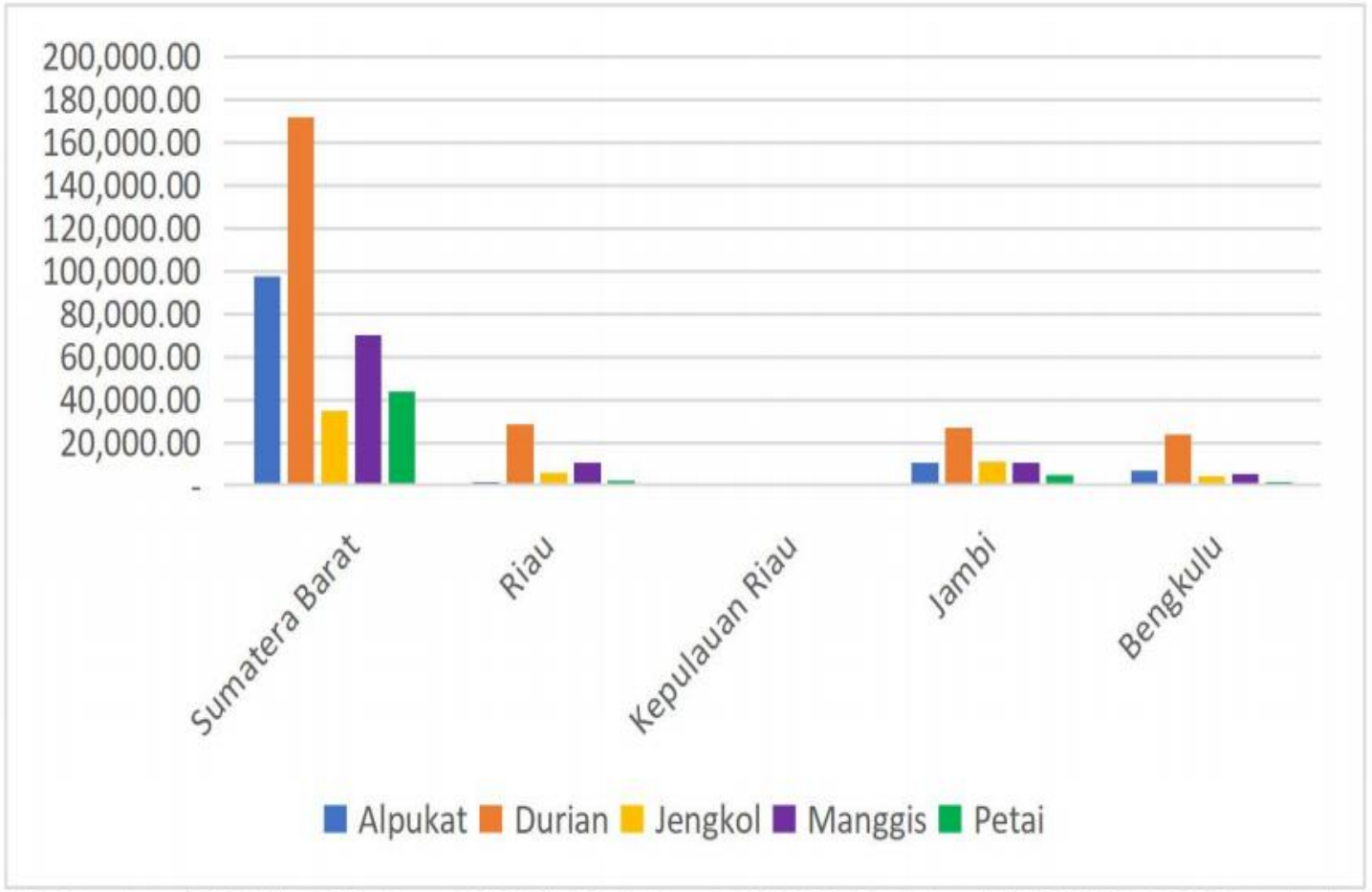

Sumber: BPS Sumbar (2022); BPS Riau (2022); BPS Kepri (2022); BPS Jambi (2022); BPS Bengkulu (2022)

Produksi Tanaman Perkebunan

Sumber: BPS Sumbar (2022); BPS Riau (2022); BPS Kepri (2022); BPS Jambi (2022); BPS Bengkulu (2022)

Produksi Gambar

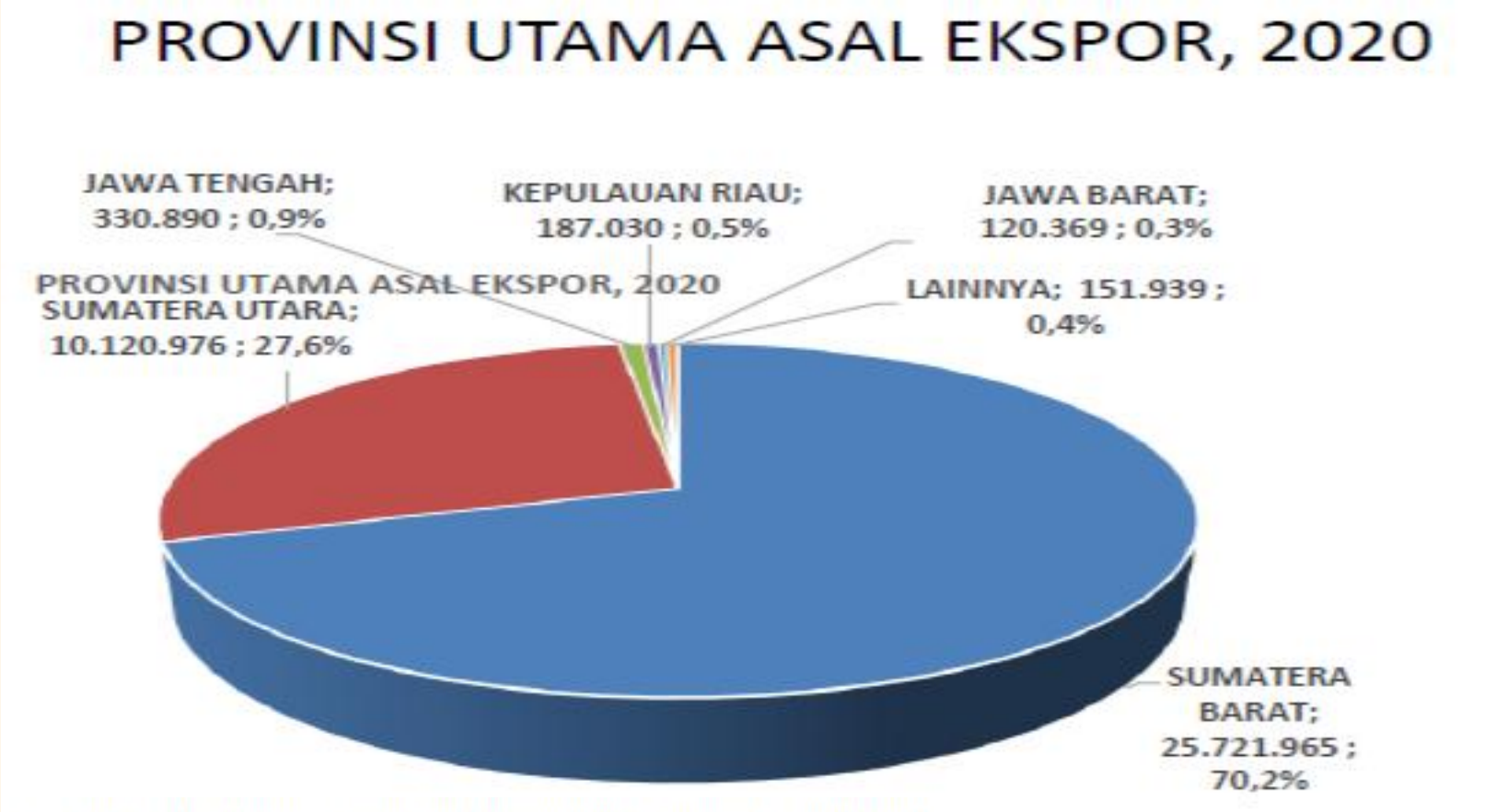

Sumber: BPS, diolah Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag (2021)

Ekspor Komoditi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan asal Sumatera Barat

Jenis Komoditi *Type of Comodity*	Volume Ekspor/*Export Volume* (Ton)		Nilai FOB/*FOB Value* (US$)	
	2020[r]	2021	2020[r]	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Hasil Pertanian/*Agriculture Products*	**543 507,08**	**680 321,24**	**101 678 365,33**	**139 254 087,58**
1. Hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya *Other Non-Timber Forest Products*	510 494,23	650 156,02	49 078 427,56	64 331 599,21
2. Tanaman Obat, Aromatik, dan Rempah-rempah/ *Medicinal, Aromatic, and Spice Plants*	19 977,51	21 095,62	44 054 775,41	58 113 008,56
3. Buah-buahan Tahunan/*Annual Fruits*	11 324,26	6 516,08	6 288 705,89	12 900 168,03
4. Biji Kakao//*Cocoa Bean*	250,00	1 000,00	560 950,00	2 171 000,00
5. Cengkeh/*Cloves*	76,07	119,91	255 357,38	522 899,11
6. Kopi/*Coffee*	331,80	177,60	646 008,83	439 235,96
7. Getah Karet dan Sejenisnya *Rubber Latex and The Like*	435,47	407,56	404 546,97	266 574,21
8. Ikan Hidup Hasil Tangkap/*Live Fish Catches*	20,42	20,61	126 756,20	153 209,75
9. Sayur-sayuran/ *Vegetables*	230,12	476,81	56 425,58	151 021,17
10. Umbi-umbian/*Tuber*	340,93	326,46	109 053,62	109 140,02
11. Lainnya/*Others*	26,27	24,57	97 357,89	96 231,56

Sumber : BPS Sumbar (2019)

Perkembangan NTP di Sumatera Barat

Sumber : Rilis BPS Sumbar pada tanggal 1 Februari 2023

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERTANIAN SUMBAR

Pertanian Unggul dan Berkelanjutan

1. Sumber daya lahan pertanian menghadapi trend penurunan kuantitas dan kualitas
2. Sumber Daya Manusia Petani Sumbar perlu mendapatkan perhatian, diantaranya pendidikan dan umur
3. Luas kepemilikan lahan sawah dan non-sawah masih kecil
4. Kelangkaan dan mahalnya saprodi serta kualitas infrastruktur prasarana pertanian
5. Hilirisasi produk pertanian belum link and match dengan industri pengolahan
6. Kelembagaan petani yang masih perlu diperkuat menuju kemandirian petani
7. Teknologi pertanian efisien dan efektif perlu didorong
8. Kelembagaan pertanian inklusif perlu didorong

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERTANIAN SUMBAR

Pertanian Unggul dan Berkelanjutan

1. Penguatan LP2B dan LSD
2. Penguatan kawasan sentra pertanian
3. Prakter pertanian ramah lingkungan berbasis sumber daya lokal
4. Smart farming, digitalisasi mendukung kemandirian petani
5. Tata kelola komoditi pertanian
6. Penguatan kelembagaan petani dan pertanian
7. Sekolah lapang pertanian (pra panen, budidaya dan pasca panen)
8. Peningkatan pendapatan petani

Logical Framework of Farmer Income Generation

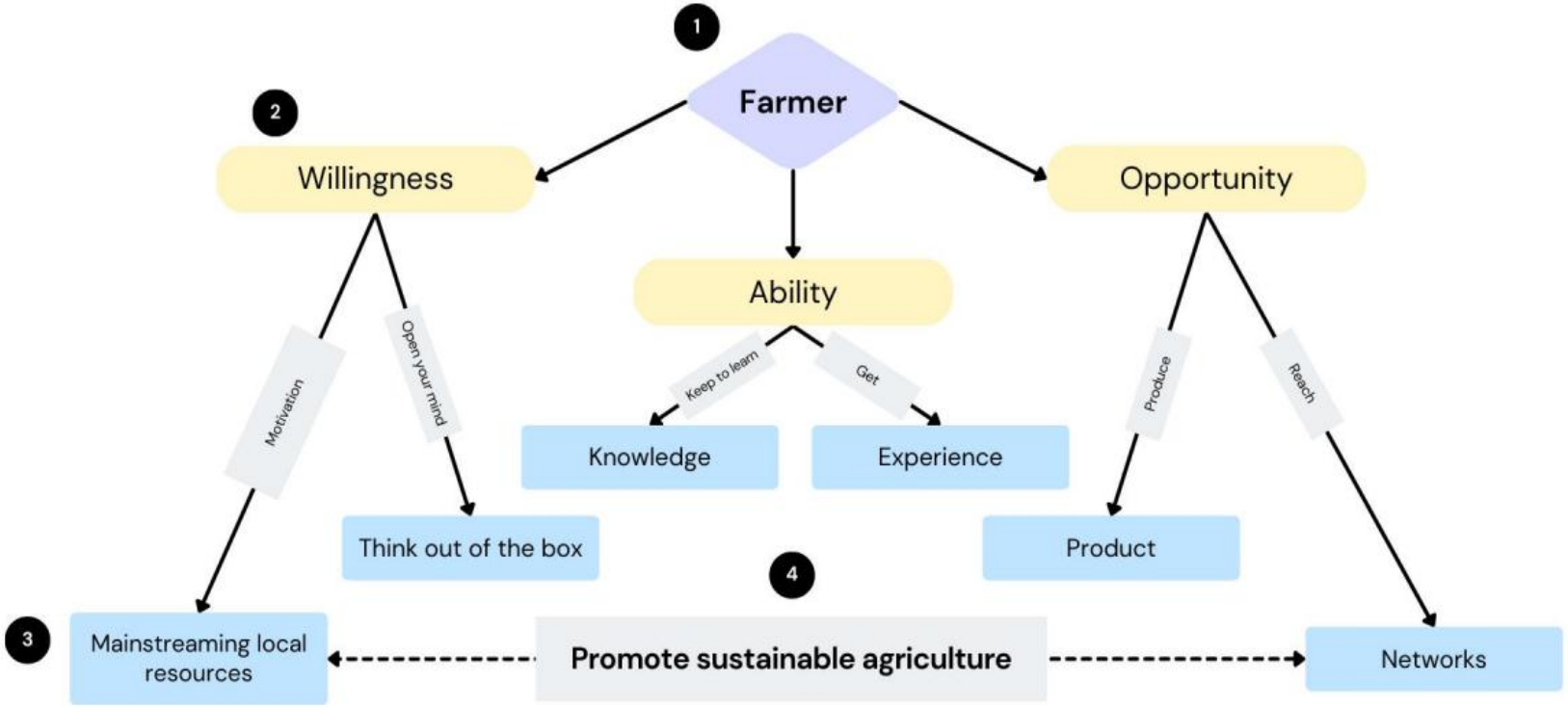

—Penutup—

“Meningkatkan pendapatan petani merupakan sebuah gagasan untuk menjamin pembangunan pertanian berkelanjutan di Sumatera Barat. Tentunya sejumlah tantangan akan dihadapi, namun dengan **keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang peduli pada pembangunan pertanian berkelanjutan di Sumatera Barat”**

“Serangkaian program dan kegiatan terus dijalankan untuk **menjamin produksi pertanian, perikanan dan kehutanan, mengembangkan usaha ekonomi rumah tangga petani/nelayan, mensinergiskan tindakan dari berbagai pemangku kepentingan, memperkuat kelembagaan petani/nelayan, serta mengembangkan sistem manajemen pengetahuan”**

“Dan akhirnya, petani/nelayan Sumatera Barat menjadi sejahtera, memiliki keunggulan dalam aktivitas budidaya dan teknologi, serta mampu menjamin keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam..”

Terima Kasih